

BRAFOPMK

BERITA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



**ANTARA TINGGINYA
TUGU KHATULISTIWA
DAN PANJANGNYA
ALIRAN KAPUAS**

Gerakan Desa untuk Desa Tertinggal dan Mandiri



LEKSIKON

**MAY DAY
SEMAKIN
MENDUNIA**

14 KESEHATAN

**MENINGKAT,
KESEJAHTERAAN TNI DI
BIDANG KESEHATAN**

18 PENDIDIKAN

**KEMBANGKAN
IPTEK, BANGUN STP**

36 EKONOMI

**CERDAS KEUANGAN
DENGAN SIMOLEK**



SURAT PEMBACA

HARAPAN WARGA PRA SEJAHTERA

Kebijakan Pemerintah yang meluncurkan tiga kartu yang disebut “kartu sakti” untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin menjadi harapan bagi masyarakat. Kartu yang menjadi simbol dari jaminan kesehatan dengan nama Kartu

Indonesia Sehat (KIS), bantuan keuangan atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan peningkatan kualitas pendidikan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat pra sejahtera. Ini didasari pada kenyataan bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan masih terbilang mahal. Adanya kartu tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya.

Kebijakan tersebut sebenarnya sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat miskin yang selama ini belum mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah. Meski awalnya sempat menimbulkan kebingungan masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin sebagai sasaran program dan para pelaksana

teknis lapangan, semoga saja segala kekurangan yang ada dapat diperbaiki sehingga realisasinya sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang pokok lainnya.

Mashudi A.B
Kendal, Jawa Tengah



Redaksi BRAFO PMK menerima kiriman naskah atau artikel terkait pendidikan, pembangunan daerah dibidang kesehatan dan kesejahteraan. Naskah bisa dikirim dalam bentuk ms.word ke: brafopmk@kemenkopmk.go.id.

DAFTAR ISI

EDITORIAL	3
FOKUS UTAMA	
GERAKAN DESA UNTUK	
DESERTA TERTINGGAL DAN MANDIRI	4
SOSIALISASI PELAKSANAAN	
UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	
SEMAKIN INTENSIF	6
DANA DESA CAIR, TRANSPARANSI DAN	
AKUNTABILITAS HARUS DIUTAMAKAN	8
WAHNARNO HADI :	
PERATURAN KABUPATEN SELESAI,	
DANA DESA DIKUCURKAN	10
APARAT HARUS MENJADI PELOPOR	
REVOLUSI MENTAL	12
KESEHATAN	14
PUSTAKA	16
PENDIDIKAN	18
IPTK	20
OPINI	22
SUARA DAERAH	24
BUDAYA	26

WISATA	29
PRODUK HUKUM	32
EKONOMI	36
INTERNASIONAL	38
PEREMPUAN & ANAK	40
REFORMASI BIROKRASI	42
UMKM	44
LINGKUNGAN	46
LEKSIKON	48
BERITA FOTO	50



Menko PMK Puan Maharani bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, beserta para kepala negara dan petinggi negara Asia Afrika melakukan perjalanan napak tilas dari Hotel Savoy Homann menuju Gedung Merdeka, Bandung dalam rangka Konferensi Asia Afrika 2015.

Brafo PMK diterbitkan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

Pembina:

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

Pengarah:

Para Deputy Menko PMK
Para Staf Ahli Menko PMK

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
PMK Republik Indonesia

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Kepala Biro Informasi dan Persidangan

Redaktur Pelaksana:

Kabag Humas dan Dokumentasi
Ponco Suharyanto, S.Sos

Staf Redaksi:

M. Shokhiyan, S.S
Siti Badriah, S.S

Ahli Tata Letak/Produksi:

Kristian Suryatna, A.Md. Graf

Sirkulasi:

Abdul Kohar

Sekretaris:

Nurseha Saputra, A.Md

Sekretariat Redaksi:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id

Penerbit:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Redaksi menerima artikel
atau tulisan juga foto.

Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang
tidak mengubah isi dan maknanya.

HUAXI

Huaxi hari ini berbeda dengan Huaxi di era 1950-an dimana desa ini terkenal karena pertaniannya yang buruk. Menyebut Huaxi saat ini, identik dengan sebuah desa yang sukses dan menjadi role model bagi banyak negara. Huaxi perlahan tapi pasti tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi berkat upaya mendiang Wu Renbao, mantan sekretaris Komite Partai Komunis setempat. Ketika itu Renbao mempunyai rencana pengembangan industrialisasi kota dan membuat perusahaan multi sektor.

Renbao tidak hanya memajukan perusahaan namun juga penduduk setempat. Pada akhir era -90an ia mulai mengembangkan sistem pertanian kolektif dan mulai membuka saham perusahaan untuk publik. Sampai akhirnya para penduduk desa menjadi pemegang saham perusahaan dan berpendapatan sedikitnya USD 131.830 (Rp 1,5 miliar)! Renbao sendiri mengatur pembagian hasil-kerja dengan prinsip “mendapatkan sesuai dengan hasil kerja” serta “kerja makin keras mendapatkan makin banyak.” Konkritnya, keuntungan 20% untuk Grop Huaxi yang melancarkan usaha, 80% digunakan untuk usaha; Dari 80% yang digunakan untuk Usaha itu, 10% untuk bonus pemborong; 30% untuk bonus manager dan teknisi; 30% untuk bonus pegawai/ buruh; 30% akumulasi modal untuk mengembangkan usaha.

Adapun semboyannya, “Pembagian lebih sedikit, akumulasi modal lebih besar, mencatatkan saham lebih besar”. Lantas bagaimana pelaksanaannya? Bonus yang seharusnya jatuh ke tangan pribadi pemborong, buruh/ pegawai, kenyataan hanya 20% yang diuangkan dan diterima orang bersangkutan, selebihnya 80% dicatitkan sebagai pembelian saham perusahaan Grop Huaxi. Jadi sekarang ini saham perusahaan Grop Huaxi telah lebih 70% menjadi hak-milik kolektif dan kurang dari 30% saham milik Komune Huaxi semula.

Tercatat pada tahun 2012, Grop Huaxi meraih keuntungan USD 9,6 miliar (Rp 112 triliun) yang dibagi antara penduduk dan pemegang saham. Jadi jangan heran kalau penduduk Huaxi mendapatkan layanan kesehatan, fasilitas pendidikan sampai penggunaan helikopter untuk transportasi secara gratis seumur hidup. Fasilitas itu sesungguhnya juga dikarenakan pungutan pajak dari masyarakat yang nilainya cukup fantastis. Konon 80% dari pendapatan tahunan penduduk Huaxi dipotong oleh pajak. Namun, sekali lagi, hal itu sebanding dengan apa yang mereka raih. Sukses Huaxi tak serta merta terbangun dalam sekejap. Mereka butuh puluhan tahun untuk menikmati masa kini. Konsep membangun dari desa dijalankan secara serius dan konsisten. Hal ini patut menjadi pedoman bagi kita. Tentu dengan tidak melupakan akar budaya desa.

Gerakan Desa untuk Desa Tertinggal dan Mandiri

Selama lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan pengentasan minimal 5.000 desa tertinggal serta membangun 2.000 desa mandiri. Untuk itu Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) diluncurkan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan pengentasan minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri. Nah, untuk mewujudkan target tersebut serta membangun desa mandiri, semua pihak, terutama Kementerian dan Lembaga (K/L) mengarahkan program-program dan kegiatannya yang berbasis desa dan kawasan perdesaan ke desa-desa dan kawasan-kawasan perdesaan potensial yang menjadi target, terutama di daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T). Upaya koordinasi dan sinkronisasi program-program K/L itu diwadahi dalam Gerakan Desa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pada awal April, pemerintah telah menetapkan Tim Koordinasi Lintas Sektor yang bertugas mengkoordinasikan juga menyinkronisasikan berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga yang berbasis desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Penetapan tim sebagai wujud pelaksanaan Gerakan Desa. Lewat Gerakan Desa, pemerintah berharap, ruh 'gotong-royong' bisa semakin menguat dan menjadi 'ruh' dalam pembangunan di desa. Disamping itu, kepentingan sektoral harus diubah menjadi gerakan yang terpadu dan terkoordinasi. Tumpang tindih program harus dihindari dan semua program-program yang mengarah ke desa disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat.

Tugas tim yang lain ialah memastikan pilar dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi optimal, yakni tata kelola pemerintahan desa yang baik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desa. Kedua pilar tersebut ditujukan untuk memastikan 'desa membangun', yaitu pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh desa dan masyarakatnya sesuai kebutuhan. Pilar tersebut akan semakin kuat apabila didukung oleh peran serta berbagai kementerian dan lembaga yang bersama-sama bergotong royong 'membangun desa', lewat pendekatan pembangunan kawasan perdesaan.

Untuk melihat pencapaian Gerakan Desa, hal itu dapat dilihat dengan pemenuhan aspek-aspek kebutuhan dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu dapat ditambahkan capaian keberhasilan dari aspek sektoral misalnya desa mandiri energi, desa mandiri benih dan desa mandiri pangan. Ke depan, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya untuk mewujudkan Nawa Cita ketiga Kabinet Kerja, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Menko PMK, Puan Maharani, Tujuan Gerakan Desa adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan

desa yang ada di kementerian-kementerian serta pemerintah daerah. Melalui Gerakan Desa, sebutnya, pemerintah akan memantau dan mengevaluasi progress pembangunan desa. Dengan begitu, lanjutnya, pembangunan bisa menjangkau jumlah desa yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia.

Walau demikian, Menko PMK mengingatkan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara bersama-sama. Pasalnya, pembangunan juga memerlukan dukungan penuh dari banyak pihak. Atas dasar itu, ia mendorong partisipasi aktif perangkat dan warga desa untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk dalam menyiapkan program pemberdayaan.

"Pemerintahan di sini tidak berarti hanya aparat dan perangkat desa, tetapi juga masyarakatnya," ucapnya.

Dengan rinci Puan menjelaskan, terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkuat Masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Masyarakat Desa mempunyai sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. "Semua harus punya visi misi yang sama dalam membangun desa dan desa membangun. Yang paling tahu permasalahan masyarakat di desa adalah masyarakat setempat, sehingga perlu difasilitasi sebuah pendampingan mandiri," imbuhnya. Adanya UU ini, tandasnya, diharapkan akan semakin mengurangi permasalahan miskomunikasi antara pemerintah danarganya. **dbb**

Sosialisasi Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Semakin Intensif

Pemerintah mulai mensosialisasikan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di penghujung April lalu di Jakarta. Perwakilan dari daerah seperti Kepala Daerah (Provinsi dan Kabupaten) juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengikuti dengan seksama sosialisasi tersebut.



Sejak mulai disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah secara sistematis mulai giat mensosialisasikan pelaksanaannya.

Akhir April lalu misalnya, bertempat di Jakarta, Sosialisasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berlangsung selama tiga hari. Tak kurang dari 1.000 orang

yang terdiri dari seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten serta kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diundang untuk kegiatan ini.

Pemerintah menginginkan kesamaan persepsi tentang peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, demikian tujuan dari sosialisasi. Selain itu juga dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam membangun desa mandiri sesuai target RPJMN 2015-2019, yakni mengentaskan minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri. Termasuk mensosialisasikan kegiatan umum dan teknis terkait dengan penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mewujudkan desa mandiri.

Adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi disebutkan sangat mendesak dilakukan mengingat dalam waktu dekat ini, seluruh desa di tanah air akan mendapatkan kucuran Dana Desa dari APBN 2015. Pemerintah, sambungnya, akan terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan menindaklanjutinya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih teknis baik di pusat maupun daerah. "Targetnya adalah seluruh pemangku kepentingan pembangunan desa dan kawasan perdesaan mempunyai pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat," ujarnya.

Kegiatan ini sendiri dilakukan secara bersama oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Kemenko PMK).

Berbagai hal dibahas dan disampaikan dalam sosialisasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Misalnya Talkshow yang mengambil tema, "Membangun Desa Mandiri" dengan narasumber Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDDT serta bahasan kesiapan daerah dalam pelaksanaan UU Desa yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Bantaeng. Disamping itu, panitia pun turut mengundang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan tentang mekanisme pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan mekanisme pengawasan dan pengendalian Dana Desa.

Terkait dengan kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Jakarta ini, para kepala daerah menyambutnya secara positif. Achmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat misalnya sangat mengapresiasi sosialisasi yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Bappenas.

Pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan, sosialisasi sangat penting untuk mencegah adanya persoalan hukum. Ia pun menekankan bahwa harus ada peningkatan kapasitas para kepala desa dan perangkatnya, guna membuat perencanaan anggaran RAPBD yang baik. "Ini harus dilatih sepenuhnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran,

hingga monitoring dan evaluasi," ujarnya. Dengan begitu, semuanya akan berjalan efektif, efisien dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Disamping itu harus dibuat laporannya dengan baik, sehingga tidak akan ada persoalan hukum.

Senada dengannya, Bupati Minahasa, Jantje Sajow mengungkapkan bahwa sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi pihaknya. "Sebab dana yang akan masuk ke desa-desa, yang ada di Minahasa khususnya, tidak sedikit, sehingga diperlukan persiapan pemerintah desa yang cukup matang, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran," ucapnya.

Sementara, kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berlangsung di pusat (Jakarta). Pemerintah juga terus intensif mensosialisasikan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di daerah. Seperti halnya di Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan yang menyasar daerah secara langsung ini pun sangat diapresiasi oleh pemerintah setempat. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu menjelaskan bahwa sosialisasi ini dirasa penting. "Sangatlah penting memberikan sosialisasi tentang kebijakan dana desa, selain tertata rapi dan terstruktur, keberhasilan pemanfaatan bantuan keuangan seperti tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dapat terealisasi sebaik mungkin," katanya. Pihaknya pun akan mengintruksikan seluruh SKPD terkait dan Kecamatan agar meningkatkan koordinasi dan fasilitas mematangkan persiapan dan kesiapan desa menyelesaikan pengelolaan desa sesuai ketentuan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. **PS/ dbs**

Dana Desa Cair, Transparansi dan Akuntabilitas Harus Diutamakan

Pemerintah membagi tiga tahap pencairan dana desa. Akhir April lalu adalah tahap pertama pencairan. Untuk mengawasi pengelolaan dana desa, pemerintah sudah mempersiapkan tim evaluasi. Akan ada konsekuensi hukum bagi pengelola dana desa yang tidak transparan dan akuntabel.

Akhir April adalah tahap pertama pencairan dana desa. Pemerintah memutuskan ada tiga tahap pencairan dana desa. Di tahap pertama pemerintah menggelontorkan Rp 20 triliun untuk 74.045 desa di seluruh Indonesia. Dengan jumlah tersebut masing-masing desa akan memperoleh Rp 250 juta sampai Rp 280 juta. Besaran dana itu disesuaikan dengan empat kriteria yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan serta kesulitan geografis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dana desa akan lebih diprioritaskan untuk desa 3T yaitu desa tertinggal, terdepan dan terpendak. Pemerintah memang menargetkan selama lima tahun ke depan bisa mengentaskan

minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri.

Adapun mekanisme penyaluran tersebut sebagaimana disepakati, uang tersebut akan dikirim oleh Pemerintah Pusat langsung ke pemerintah kabupaten. Setelah sampai di kas APBD, Dana Desa dikirimkan ke masing-masing rekening desa. Rekening tersebut bisa milik kepala desa, bendahara, atau milik siapapun yang disepakati.

Sebagai informasi, pemerintah memfokuskan perhatian pada empat (4) hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan undang-undang desa untuk merealisasikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni : (1) Pemerintahan Desa sebagai pelaksana UU Desa di lapangan harus dikuatkan. Para aparat desa akan diberikan informasi yang lengkap



dan pelatihan yang memadai; (2) aparat desa dan masyarakat akan diberikan pendampingan untuk mengelola Dana Desa agar lebih optimal. Pendampingan ini sangat penting karena itu proses rekrutmen akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sehingga kualitasnya sesuai dengan kebutuhan; (3) Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel diperlukan pengawasan yang baik baik dari lembaga formal maupun pengawasan dari masyarakat.



Disamping itu, Pemerintah Pusat pun mendorong peran yang besar kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi bertugas memastikan bahwa prinsip “desa membangun” yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa nyambung dengan prinsip “membangun desa” yang dilaksanakan oleh K/L dan stakeholders lainnya. Prioritas pembangunan desa harus diselaraskan dengan prioritas RPJMN 2015-2019. Sedangkan Pemerintah Kabupaten bertugas memastikan bahwa berbagai regulasi yang diperlukan untuk penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa tersedia

dan rencana pembangunan kawasan perdesaan selaras dengan RPJMD dan RPJMN.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah memang selalu mewanti-wanti kepada pemerintah daerah. Termasuk ketika sosialisasi pelaksanaan undang-undang desa. Atas dasar itu pemerintah sudah mempersiapkan tim untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dana desa yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat dan pendamping dari Kementerian Desa PDTT. BPK juga menjalin kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna menerbitkan modul pelaporan

yang akan dibagikan ke desa-desa. Nantinya, pemerintah desa pun akan didampingi dan dibantu oleh para pendamping desa, yang untuk sementara masih menggunakan eks PNPM.

Kekhawatiran bahwa nantinya akan banyak muncul temuan (oleh BPKP dan KPK) atas kesalahan pemanfaatan dana desa dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa juga diungkapkan Menko PMK. Pasalnya dana untuk setiap desa termasuk angka yang besar. Dengan begitu perlu hati-hati pengawasannya. Apalagi menurutnya disaat yang sama Indonesia akan menjalankan pemilihan kepala daerah serentak. Atas dasar itu Menko PMK meminta jangan sampai dana desa dipolitisasi.

Puan juga telah meminta kepada Wakil Menteri Keuangan agar jangan mencairkannya kalau mekanisme dan aturannya belum jelas. Adapun payung hukum yang dimaksud ialah peraturan gubernur mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang belum memuat anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Tanpa peraturan gubernur yang memuat mekanisme pencairan serta pengawasan, ia menilai pencairan dana desa rawan penyalahgunaan. Karenanya pula, Menko PMK meminta para gubernur segera menekan peraturan terkait dengan APBDes sehingga dana desa senilai Rp 400 juta bisa dicairkan dan pembangunan bisa dilaksanakan.

Dana itu sendiri bebas dialokasikan, baik untuk jalan desa, irigasi, BUMDes, revitalisasi pasar desa, dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya dana desa, disparitas antardesa bisa dipersempit. Selama ini, seperti diketahui, masih ada jarak yang lebar antara desa di perbatasan Indonesia, pulau terluar dan terpencil dengan desa-desa di Jawa, atau antara desa-desa di barat dan di timur Indonesia. **PS/db**



Wahnarno Hadi :

Peraturan Kabupaten Selesai, Dana Desa Dikucurkan

Sosialisasi Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terus dilakukan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan sosialisasi, hasil yang dicapai serta proses pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BRAFO PMK mewawancarai Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang juga Ketua Tim Koordinasi Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa), Ir. Wahnarno Hadi, MS di ruang kerjanya. Berikut hasil wawancara tersebut.

Apa yang melatarbelakangi Sosialisasi Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengundang sejumlah kepala daerah di Jakarta pada akhir April lalu?

Pemerintah daerah terutama Kabupaten diharapkan dapat mempersiapkan beberapa peraturan yang harus segera diselesaikan kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Hal itu terkait dengan proses pencairan dana

desa yang berasal dari kas negara kepada Kabupaten. Peraturan dari Bupati itu harus berisikan penetapan atau pengalokasian dana-dana untuk masing-masing desa. Dengan tidak adanya peraturan tersebut, otomatis dana desa tidak bisa dicairkan. Kita berharap, kabupaten-kabupaten dapat menyelesaikan hal itu. Seharusnya di minggu kedua April dana desa harus cair 40 persen, lalu di minggu keDua Agustus 40 persen lagi dan di minggu kedua 20 persen.

Apakah pesan yang disampaikan dalam Sosialisasi Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu bisa dipahami para kepala daerah untuk kemudian mereka terapkan?

Hal itu sebenarnya bisa dilihat dari proses pencairan dana desa dimana dari sekitar 434 kabupaten yang berhak menerima (tentu dengan menyelesaikan peraturan terlebih dahulu), baru 186 Kabupaten yang bisa menyelesaikan peraturan dan dapat menerima dana desa.

Kami memaklumi hal ini baru bagi mereka, karena itulah sosialisasi harus dilakukan. Dengan sosialisasi diharapkan mereka lebih mengerti akan mekanisme pencairan dan segera menyelesaikan peraturannya.

Dari 186 Kabupaten yang telah menyelesaikan peraturan dan menerima dana desa tadi, apakah mereka dapat langsung mengucurkan dana ke desa agar desa dapat menggunakannya?

Yang perlu diketahui, peraturan kabupaten memang sudah diselesaikan oleh mereka. Dan dari Kas negara pun telah mengucurkannya ke rekening Kabupaten. Namun dana itu belum dapat dikucurkan ke desa dari kabupaten. Sebab disaat yang sama, kita juga harus mempersiapkan aparat-aparat desa juga para pendamping. Jangan sampai uang telah dikucurkan ke rekening desa namun perangkat desanya belum siap. Kita perlu melatih aparat dan pendamping di desa terlebih dahulu. Nah, Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait tengah mempersiapkan pelatihan tersebut.

Nampaknya sosialisasi yang berkelanjutan dan luas masih perlu dilakukan pemerintah?

Iya benar sekali. Selesai sosialisasi di Jakarta misalnya, K/L terkait masih menindaklanjutinya dengan sosialisasi sejenis ke lapangan. Mereka secara kontinyu akan melakukannya ke berbagai daerah. Kalau tidak salah, sekitar 130 daerah akan dikunjungi untuk sosialisasi dalam waktu dekat.

Sosialisasi di Jakarta sendiri pada akhir April lalu menyampaikan pesan apa selain mekanisme pencairan dana dan kewajiban membuat peraturan bagi Kabupaten?

Selain menyampaikan telah tersedianya dana desa, kami juga mensosialisasikan program-program

yang menjadi tanggung jawab K/L atau pemerintah juga daerah bagi desa. Seperti diketahui, UU Desa mengamankan pemerintah untuk membangun desa. Nah, Kemenko PMK akan mengkoordinasikan pula berbagai program yang ada di K/L, dunia usaha serta organisasi masyarakat untuk menyelesaikan desa terpencil, terdepan dan terluar (3T). Pemerintah pun sudah menargetkan hingga 2019 nanti membangun 5000 desa tertinggal dan menciptakan 2000 desa mandiri. Belum lagi adanya Desa Membangun yang merupakan swadaya masyarakat. Semua itu dikoordinasi Tim Koordinasi Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) yang ada di Kemenko PMK dan anggotanya berasal dari berbagai lintas K/L. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menko PMK.

Terkait dengan dana desa yang turun hanya 250-an juta untuk saat ini dan jauh dari angka 1 miliar, banyak desa yang belum memahaminya. Apa penjelasannya?

Yang perlu diketahui, dana desa murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini dianggarkan hanya sekitar Rp 20,7 Triliun. Dengan begitu setiap desa hanya mendapatkan sekitar Rp 253 juta saat ini. Kita memang harus menyesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran pemerintah. Namun perlu diketahui tahun depan secara bertahap dapat ditingkatkan sehingga nantinya setiap desa mendapatkan Rp. 1,4 miliar. Saat ini juga yang perlu diketahui, UU Desa pun mengamanatkan kepada pemerintah, selain dana desa, daerah sesungguhnya akan mendapatkan bagian dari alokasi retribusi daerah yang jumlahnya bisa lebih besar. Jadi dengan begitu, tidak semata-mata dari dana desa, namun masih ada sumber lainnya. Yang perlu ditekankan, tekad pemerintah memberikan dana desa sudah baik dan *on the track*.

Sesungguhnya apa perbedaan antara PNPM dengan Dana Desa?

UU Desa ialah semacam penyempurnaan PNPM. Jika pada PNPM pengucuran dananya pada kecamatan, pada UU Desa justru ke desa. Dengan UU Desa semua desa berhak memperoleh dana desa. Ini berbeda dengan PNPM dimana dana dikucurkan ke kecamatan yang jumlahnya secara maksimal Rp 3 Miliar. Itu pun tidak semua desa bisa mendapatkan karena adanya kompetisi antar desa dalam setiap kecamatan untuk mendapatkan dana PNPM. Juga disebabkan banyaknya jumlah desa dalam satu kecamatan. Jadi bisa dibilang dengan UU Desa pengelolaan anggarannya lebih luas lagi.

Bagaimana proses pengawasan terhadap dana desa itu sendiri?

Kami berharap setiap masyarakat desa kelak bisa mengawasi penggunaan dana desa. Kita juga akan membuat pusat pengaduan terkait dana desa nantinya. Belum lagi nanti akan ada monitoring dan evaluasi dari berbagai K/L. untuk sementara, masyarakat bisa menggunakan saluran pengaduan yang tersedia seperti LAPOR atau lembaga lain yang terkait.

Lantas apa peran pendamping desa kelak?

Pendamping desa berperan untuk perencanaan kegiatan desa, memfasilitasi pemanfaatan penggunaan dana desa, memonitor dan mengawal agar dana desa digunakan semestinya. Pemerintah memPrioritaskan mantan fasilitator PNPM untuk menjadi pendamping mengingat mereka sudah siap dan berpengalaman. Untuk sementara 1 pendamping untuk 3 desa. Idealnya, nanti 1 desa 1 pendamping. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan petunjuk teknis dan proses rekrutmen. Kami berharap bulan Mei bisa selesai.

APARAT HARUS MENJADI PELOPOR REVOLUSI MENTAL

Aparat pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah diharapkan menjadi pelopor gerakan nasional revolusi mental. Untuk mewujudkan hal tersebut diadakanlah pendidikan dan latihan (diklat) revolusi mental.



Mewakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Sekretaris Menko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo mengatakan aparat pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah diharapkan menjadi pelopor gerakan nasional revolusi mental. “Dengan diklat revolusi mental yang dilakukan oleh kampus revolusi mental ini, peserta nantinya

bisa menjadi pelopor di daerahnya untuk memulai gerakan revolusi mental secara lebih lanjut,” ujarnya dihadapan peserta diklat revolusi mental asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Revolusi mental, lanjut Sesmenko PMK, merupakan upaya merubah pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemaslahatan umum sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa-

bangsa di dunia. Sugihartatmo mencontohkan seperti yang terjadi di Jerman dan Norwegia yang dikenal sebagai welfare state, maupun Jepang dan Korea Selatan di Asia yang kita kenal dengan kemajuan teknologi dan etos kerja keras bangsanya.

Dijelaskannya, dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing sebagai aparatur sipil negara, mereka harus mampu menjabarkan gerakan revolusi

mental ini dalam bentuk tindakan sesuai tugas dan fungsinya. Dengan begitu bisa diikuti dan menjadi contoh teladan bagi jajaran dibawahnya. Sesmenko PMK berharap, melalui diklat diharapkan dapat menghasilkan SDM yang baik, jujur, berintegritas, tidak melakukan korupsi, pekerja keras dengan etos kerja yang tinggi optimis produktif, inovatif, berorientasi pada kemaslahatan umum dan mampu melayani masyarakat. “Tanamkan pemikiran kreatif menggembelng manusia Indonesia. Sebab sehebat apapun kelembagaan yang diciptakan, tidak akan bagus jika ditangani manusia bermental tidak baik,” tandasnya.

Diklat revolusi mental asal pemerintah provinsi kepulauan Babel ini merupakan angkatan ke VI Diklat Revolusi Mental Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Subang, Jawa Barat. Kendati demikian, Bangka Belitung menjadi yang pertama mengirimkan pejabat mengikuti diklat ini. Sebanyak 64 pejabat eselon II dan III di lingkungan provinsi Babel mengikuti diklat revolusi mental. Selama ini, memang peserta diklat hanya berasal dari jajaran pejabat di lingkungan kabupaten/kota.

Gubernur Babel Rustam Effendi mengakui, mengubah mental Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan perkara mudah. Salah satu upaya dilakukan Pemprov Babel yaitu, mengirimkan pejabat mengikuti diklat. Diharapkan diklat tersebut dapat mengubah perilaku pejabat, sehingga lebih tanggap melayani masyarakat. Ia merasa kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan. Karenanya Rustam menyarankan kepada pemerintah pusat agar membuat aturan sebagai payung hukum agar semua pemerintah daerah bisa mengikuti kegiatan ini. Rustam menilai, diklat seperti ini diperlukan untuk memperbaiki



mental aparatur yang mulai rapuh membela bangsa. Sekarang dapat dilihat, komunikasi antara aparatur terbangun. Sehingga aparatur mempunyai peran dan harus bermanfaat bagi negara. “Jajaran aparatur secara nasional harus mengikuti diklat ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersih,” tekannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Ermaya Suriadinata, menyebutkan gerakan revolusi mental yang saat ini kembali digaungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK merupakan gagasan Presiden ke-1 Soekarno. “Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembelng manusia untuk menjadi lebih baik dan menjalankan hidup baru,” cetusnya. Diklat revolusi mental ini, jelasnya, bertujuan mempersiapkan calon generasi bangsa dan menciptakan aparatur sipil negara yang bersih. Hingga saat ini diklat revolusi mental sudah menghasilkan enam angkatan. “Peserta dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

merupakan angkatan ke VI diklat ini. Berbagai kalangan mengikuti kegiatan ini di antaranya pejabat negara, eselon, lurah, dosen hingga guru,” paparnya.

Terkait Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Ermaya menerangkan, kampus ini sengaja dibangun sebagai tempat merevolusi mental. Peserta yang mengikuti diklat ini sudah siap menerima pembekalan untuk mengubah perilaku. “Sebab revolusi mental merupakan suatu kegiatan untuk menggembelng manusia menjadi lebih bersih. Jika aparatur diamanatkan mengolah keuangan untuk kesejahteraan rakyat, maka uang tersebut harus sampai kepada masyarakat,” imbuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam diklat dilibatkan guru besar dan doktor dibidang psikologi, pemerintahan, pembangunan juga keuangan. “Pelatihannya tidak hanya dilakukan di kelas secara teori, tetapi juga di lapangan untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkannya secara baik,” pungkasnya. **PS/ dbs**

MENINGKAT, KESEJAHTERAAN TNI DI BIDANG KESEHATAN

Upaya perbaikan dalam layanan kesehatan untuk para prajurit TNI kian ditingkatkan. Demikian juga jumlah besaran kesejahteraan prajurit lainnya.

Sore itu, di hadapan lima ribu prajurit TNI AD, Presiden Joko Widodo dengan mengenakan Baret hijau dan seragam Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) dilengkapi pistol dan pisau di pinggang, menghadiri peresmian tanda dimulainya pembangunan RS Ridwan Meuraksa di Pinang Ranti, Bambu Apus, Jakarta Timur, pertengahan Mei lalu.

Acara kemudian dilanjutkan dengan menekan sirine sebagai tanda dimulainya peletakan batu pertama RS Ridwan Meuraksa oleh Presiden RI, Joko Widodo; Menko PMK, Puan Maharani; Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno; Menkes, Nila Moeloek; Panglima TNI, Moeldoko; dan KSAD, Gatot Nurmantyo.

KSAD dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan RS Ridwan Meuraksa ini sebenarnya sudah diidam-idamkan sejak lama mengingat kebijakan pemerintah dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, RS Ridwan Meuraksa yang sebelumnya berada di Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, sudah tidak

memungkinkan untuk melayani pasien lebih banyak. Ketika belum ada KIS, pasiennya mencapai 400 dan sekarang ketika KIS diterbitkan mencapai lebih dari 1.000 pasien.

"Kemudian dipindahkan ke tempat ini, mendekatkan fasilitas kesehatan dengan asrama prajurit, seperti Kopassus, Brigif I Jaya Sakti, Kostrad, kemudian di Tangerang Bekasi dan Bogor, sehingga hal ini sangat membantu dan meringankan ongkos," ungkap KSAD lagi.

Berdiri di luas lahan sekitar 2,6 hektare, pembangunan RS yang nantinya akan memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang lengkap ini diharapkan cepat selesai sehingga dapat segera digunakan oleh para prajurit TNI dan juga masyarakat umum.

Kabar yang cukup menggembirakan bagi para prajurit TNI/Polri disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah tunjangan kinerja TNI/Polri terhitung bulan Mei sudah dinaikkan dari 37 persen menjadi 56 persen dan akan diberikan pada bulan Juni. Selain itu, Negara juga sudah menyiapkan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk pembangunan perumahan di jajaran



TNI yang pengelolaannya akan diserahkan langsung ke TNI.

Presiden juga berjanji akan segera terus memperbaiki ekonomi Indonesia agar tembus di atas tujuh persen. Jika itu tercapai, anggaran untuk TNI yang tadinya hanya Rp98 triliun, naik menjadi hingga Rp 210 triliun.

"Itu bisa dicapai di negara mana pun kalau ada stabilitas keamanan, dan alhamdulillah, sampai saat ini stabilitas keamanan berjalan baik, stabilitas politik juga berjalan dengan baik sehingga kita tinggal konsentrasi urus hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi," kata Presiden lagi.

Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), salah satu program BPJS adalah jaminan kesehatan yang menyebutkan pula bila prajurit TNI/Polri termasuk dalam layanan BPJS



Kesehatan itu. Dengan demikian sistem layanan yang selama ini berlaku di lingkungan TNI mengalami perubahan.

Dengan adanya BPJS kesehatan, layanan kesehatan bukan menjadi tugas pokok kesehatan TNI. Pelayanan kesehatan terhadap personel TNI dan keluarganya diperlakukan sama dengan rakyat Indonesia lainnya. Selain itu, personel TNI dan keluarganya juga dapat meminta pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan lain yang bekerjasama dengan BPJS. Hingga saat ini, jumlah peserta peralihan TNI sebanyak 859.216 peserta beserta anggota keluarga dan peserta Polri sebanyak 734.454 peserta beserta anggota keluarga.

Peristiwa lain yang membanggakan adalah Indonesia baru-baru ini mendapatkan kehormatan sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan Konferensi Kedokteran Militer Dunia

(ICMM) ke-41 di Nusa Dua, Bali.

Menhan, Ryamizard Ryacudu, menegaskan bahwa kedokteran militer dunia menghadapi tantangan berat pada masa mendatang mengingat masih banyak terjadi konflik bersenjata dan bencana alam di beberapa negara.

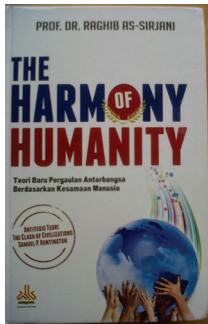
Menhan menambahkan, tantangan itu merupakan ancaman nyata suatu bangsa sekaligus menjadi kesempatan bagi negara untuk memberikan kontribusi. Selama keketuaan Indonesia dua tahun mendatang, Menhan mengharapkan akan ada kemajuan bagi tenaga medis dan dokter militer Tanah Air.

“Selama dua tahun ini kami berharap semakin menjadikan dokter militer tanggap Indonesia mampu dan profesional menghadapi penyakit cangguh.”

Sementara menurut Kapuskes TNI, Daniel Tjen, ajang ini dapat dimanfaatkan Indonesia dengan

sebaik-baiknya. “Kami berharap pertemuan dapat menjadi forum promosi dan investasi untuk perkembangan kedokteran militer sekaligus peningkatan kapasitas mengingat peserta merupakan para ahli di bidangnya sekaligus terlibat dalam pengambilan kebijakan maupun proses pengambilan keputusan di negaranya masing-masing. Lebih luas lagi, *41st ICMM World Congress on Military Medicine* bukan hanya berfungsi sebagai pertemuan ilmiah, tetapi juga dapat menciptakan momentum untuk meningkatkan kontribusi dan perkembangan kedokteran militer terhadap kesejahteraan masyarakat, berbagi terhadap kebutuhan masyarakat menciptakan forum untuk pembelajaran dan efek turunnya bagi bangsa serta menjaga perdamaian.”

(IN)



HIDUP HARMONI ATAS DASAR KESETARAAN

Judul :
The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia
Pengarang :
Prof. DR. Raghieb As-Sirjani
Penerbit : Pustaka Al-Kautsar
Tahun Terbit : 2015

Tampaknya potret keluarga inilah yang mendasari tesis The Harmony of Humanity. Dan jika menilik lebih jauh dalam sejarah panjang umat manusia. The Harmony of Humanity menjadi semacam pengungkit bahwa selayaknya manusia hidup damai dalam ragam perbedaan yang ada. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk membenarkan konflik.

Sebaliknya, yang perlu terus diutarakan adalah kesamaan umat manusia menuju kemaslahatan bersama. Berbagai klan manusia dihadapkan pada dua pilihan cara untuk menggapai berbagai kepentingan, yaitu muslihat dan benturan atau pergaulan dan hidup bersama.

Ini bukan berarti bahwa pergaulan menjadi logika yang dominan, karena ada saja orang yang memenuhi kepentingan pribadi tanpa memedulikan kepentingan orang lain. Itulah sebabnya, benturan dan muslihat menjadi caranya untuk menggapai keinginannya (halaman 23). Buku karya Profesor Raghieb as-Sirjani ini ingin mengukuhkan bahwa tak ada alasan bagi manusia untuk

bermusuhan (konflik).

Pasalnya, manusia mempunyai banyak kesamaan sebagai modal membangun kerukunan dan perdamaian. Salah satu kesamaan itu adalah apa yang ia sebut sebagai kesamaan tertinggi. Kesamaan tertinggi adalah setiap manusia memiliki gambaran tertentu tentang Tuhan. Gambaran itulah yang menjadi keyakinan (akidah) yang kuat sehingga tidak mudah untuk dicabut selamanya.

Keyakinan inilah yang dapat menjadi tempat bernaung puluhan suku, ras, dan warna kulit. Namun seiring dengan itu, ia juga dapat menjadi penyebab konflik yang parah. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah jangan pernah mengusik keyakinan pihak lain (halaman 133).

Selain itu, manusia juga mempunyai kesamaan umum, dalam hal ini adalah kepemilikan akal. Kesamaan umum akal bertujuan agar berbagai suku bangsa dapat bertemu pada hal-hal yang rasional, bukan spiritual; pada dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran, bukan pada kesan pikiran atau perasaan ataupun hal-hal gaib. Di titik inilah akan terjadi koneksi dan pergaulan (halaman 138).

Dengan demikian, pelarangan penggunaan akal dalam kehidupan merupakan hal yang aneh. Pasalnya, larangan penggunaan akal menunjukkan cacat serta kesia-siaan pada kemanusiaan. Tidak diragukan lagi, hal itu akan menyeret ke arah peperangan dan konflik. Saat akal telah teroptimalkan dengan baik, maka ia akan menghasilkan ilmu pengetahuan.

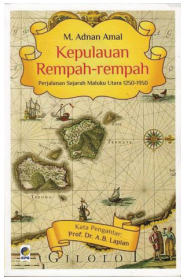
Ilmu pengetahuan tentang

kehidupan memiliki peran signifikan dalam perjalanan menentukan pertemuan peradaban antarbangsa meskipun jarak mereka relatif berjauhan. Ilmu pengetahuan pun mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan kolektif agar setiap peradaban dapat maju dan berkembang dengan pengalaman peradaban lain (halaman 411).

Oleh karena itu, dialog besar haruslah dilakukan antarkaum intelektual dan cendekiawan di dunia ini untuk merumuskan perjanjian kehormatan yang membahas tentang komitmen-komitmen standar yang harus dipenuhi, dan wajib dijaga oleh ruang seni. Ruang seni merupakan wadah kesamaan umum. Maka itu, pelanggaran terhadapnya merupakan perlawanan terhadap karakter manusia dan hak naluriannya.

Ditambah lagi dengan ruang kesamaan tertinggi, yang pelanggaran dan permusuhan terhadapnya sama artinya dengan permusuhan terhadap simbol kesucian agama yang tertanam mendalam dalam emosional umat. Sungguh, tidak seorang pun mendapat kebaikan jika seni dijadikan sebagai senjata perang (halaman 547).

Lebih lanjut, tesis utama dalam karya ini adalah kesamaan umat manusia dan urgensitasnya merupakan dasar pemersatu umat manusia. The Harmony of Humanity membawa angin segar bagi terciptanya perdamaian dunia didasarkan pada kesamaan manusia bukan pada perbedaan.



REMPAH-REMPAH MENGGUNCANG DUNIA

Judul Buku : Kepulauan Rempah-rempah, Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950
 Pengarang : M. Adnan Amal
 Penerbit : KPG
 Tahun Terbit : 2010

Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian dari Nusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempeng Australia. Ia berbatasan dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Nugini di timur, dan Timor di sebelah selatan, Palau di timur laut. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa

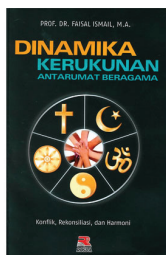
menamakannya “Kepulauan rempah-rempah” -istilah ini juga merujuk kepada sekelompok pulau di Afrika.

Sejak 1950 - 1999, Kepulauan Maluku secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Utara kemudian ditetapkan sebagai Provinsi Maluku Utara. Sejarah Maluku sebagai kepulauan rempah-rempah memang mengandung catatan luka dan impian tak terbayangkan. Negeri-negeri Eropa bertualang dan bersaing ketat untuk memburu rempah-rempah. Maluku yang kaya rempah-rempah itu cepat terkuras oleh kelihaian ulah politik-ekonomi bangsa-bangsa penjajah, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.

Fragmen awal kolonialisme memang memudahkan orang mengenangkan Maluku. Buku karya

Adnan Amal ini sengaja hadir dengan pelbagai penjelasan sejarah dan argumentasi tentang lakon ekonomi, politik, sosial, dan agama di Maluku Utara. Pembaca tentu tidak sekadar disuguhi oleh fragmen kolonialisme saja, tetapi juga rentangan sejarah panjang mulai dari 1250 sampai 1950 yang menegangkan.

Buku ini terbagi dalam 18 bab disertai lampiran-lampiran penting mengenai pelbagai hal. Penulis cukup telaten menarasikan kisah-kisah pada masa kerajaan Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan di Maluku. Narasi sejarah itu dilacak mulai dari mitos, legenda, folklor, hingga dokumen-dokumen sejarah. Uraian mengenai sejarah Maluku cukup memikat meski pembaca membutuhkan ketelatenan untuk pemahaman utuh mengenai tokoh, peristiwa, atau tahun.



MERAJUT DAMAI INDONESIA

Judul Buku : Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama
 Pengarang : Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.
 Penerbit : Remaja Rosdakarya
 Tahun Terbit : Januari 2015

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsekuensi pilihannya adalah republik, yang dengan begitu harus mengayomi dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia.

Sebab, hal yang paling sukar dilupakan adalah konflik agama. Pun muncul pertanyaan bagaimana kehidupan beragama di Indonesia pascareformasi? Apa ancaman yang kerap menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal?

Kita bisa cermati bahwa kehidupan beragama di Indonesia masih sering

terjadi konflik, baik vertikal maupun horizontal. Tentu dalam memori bangsa, kita sulit melupakan konflik agama yang dialami warga Syiah di Sampang Madura, mereka dikebiri oleh sekelompok orang, warga Ahmadiyah di Pandeglang Banten diserang oleh “preman berjubah” yang membawa atribut agama, dan perusakan rumah ibadah seperti gereja.

Catatan buruk ini merupakan mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang menekankan ke-Bhineka Tunggal Ika, serta negara menjamin warganya untuk meyakini keyakinannya dan beribadat sesuai keyakinannya, seperti termaktub

dalam kitab UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Negara kerap abai terhadap kalangan minoritas dan takluk serta tunduk oleh suara mayoritas.

Penegak hukum kerap dipermalukan oleh “segerombolan” orang yang seenaknya membabi buta memperlihatkan “kegarangan” dengan membawa parang untuk membunuh sesama manusia di hadapan orang banyak. Hukum dilecehkan sehingga tak berdaya. Buku yang ditulis oleh Faisal Ismail mengulas Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni.

Faisal mengajak kita untuk mencari akar teologis bahwa agama diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Terutama Islam, merupakan agama dengan visi-misi yang secara totalitas mengajarkan umatnya untuk selalu menyebarkan keselamatan, menciptakan kedamaian, dan menegakkan perdamaian dalam semua aspek.

KEMBANGKAN IPTEK, BANGUN STP

Taman Sains dan Teknologi (STP) sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Mungkin lebih kurangnya mirip dengan konsep STP yang sudah dimiliki Kota Solo.



Awal Mei lalu, Menko PMK, Puan Maharani, dengan resmi meluncurkan Kick Off Program Nasional Pengembangan 100 STP di kawasan Bandung Technopark, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. 100 STP itu rencananya dapat dikembangkan seluruhnya hingga tahun 2016. Ke-100 STP rintisan itu juga melibatkan

sejumlah kementerian, lembaga negara, dan para kepala daerah yang sudah berkomitmen untuk segera mengembangkan STP di wilayah mereka masing-masing.

Dalam sambutannya, Menko PMK menegaskan bahwa pengembangan STP ini harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Selain paham teknologi

yang coba diperkenalkan, SDM itu juga harus mampu diandalkan demi keberlanjutan STP yang sudah terbangun tadi.

“Bila perlu, STP yang dibangun nantinya tidak hanya mengembangkan teknologi tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi dan rekreasi untuk para keluarga Indonesia. Tidak hanya orang dewasa

yang sepulang dari STP jadi mengerti teknologi tetapi juga anak-anak, bagaimana caranya mereka mau datang ke sini dan mencari tahu segala hal tentang teknologi maju paling terkini,” demikian Menko PMK.

“STP juga saya harapkan dapat menjadikan masyarakat di sekitarnya semacam duta STP. Mereka dapat menjelaskan berbagai hal tentang STP sambil mencoba memperkenalkan kearifan lokal yang mereka miliki kepada setiap tamu yang berkunjung. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga dapat terangkat dan lebih baik. Sekali lagi, membangun STP harus benar-benar mempersiapkan dulu SDM-nya agar tidak hanya ada tempatnya tetapi masih mempertanyakan bagaimana kelanjutannya.”

Program nasional Pengembangan STP ini sesungguhnya merupakan amanat yang tercantum dalam Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo. STP merupakan kawasan yang dikelola secara manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek yang relevan.

STP semacam ini salah satunya dapat dilihat di Solo Technopark yang berada di bawah manajemen Pemkot Surakarta, Jawa Tengah, dan sudah dirintis sejak 2012 lalu. Solo Technopark adalah kawasan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang memadukan unsur pengembangan iptek, kebutuhan pasar industri dan bisnis serta penguatan daya saing daerah.

Solo Technopark juga merupakan pusat vokasi dan inovasi teknologi, pusat riset teknologi terapan di Kota Surakarta, yang dibangun dari sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis,

dan pemerintahan (*The Triple Helix Model of Innovation*) serta komunitas masyarakat.

Menurut sejarahnya, proses kemunculan STP bermula dari ide sekelompok masyarakat yang merupakan akademisi di kota Surakarta pada periode 1995 hingga 1998, yang melihat besarnya jumlah kebutuhan sektor industri di sekitar wilayah Surakarta akan tenaga kerja terampil di bidang permesinan. Sementara itu, pasar tenaga kerja lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan industri sehingga untuk memenuhi kebutuhan, banyak merekrut tenaga dari luar wilayah. Tergerak untuk menyediakan sumber daya manusia terdidik dan terlatih, sekumpulan pimpinan (kepala sekolah) dari Sekolah Menengah Kejuruan di Surakarta bersepakat untuk mencetak SDM siap kerja.

Pada tahap-tahap awal, para kepala sekolah itu merintis upaya ini dengan cara kerjasama antarsekolah yang ada dengan mengadakan pelatihan di tiap laboratorium sekolah. Ide dan semangat ini lalu mendapat dukungan dari pimpinan Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo. ATMI Solo bersedia menyediakan tenaga mentor ataupun staf pengajarnya untuk memberikan pelatihan tentang teknik mesin bagi siswa-siswa ataupun lulusan SMK agar siap kerja.

Para pengajar ATMI lalu mulai menyadari bahwa penguatan jaringan di dalam wilayah Surakarta tidaklah cukup. Maka, mereka mulai melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerjasama ini dibina dalam rangka memberikan standar terhadap keahlian dimiliki oleh tiap peserta pelatihan. Pada akhirnya, dilakukan sertifikasi kemampuan dan keterampilan permesinan untuk pertama di Indonesia terhadap para siswa

ataupun lulusan SMK diawali dari SMK di Surakarta. Kerjasama tidak hanya dilakukan terhadap institusi di dalam negeri, ATMI kemudian membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di luar negeri. Salah satunya dengan institusi di Jerman melalui program IGI (Indonesia German Institut). Proses ini dilakukan sepanjang tahun 1998 hingga 2001.

Pesatnya perkembangan SCTC sebagai pusat pelatihan mekanik di Surakarta mampu berkontribusi dalam melatih pemuda pengangguran, mengupayakan tempat kerja, serta mewujudkan terbentuknya jaringan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan industri yang saling melengkapi. Kesuksesan ini mendapat sambutan dari Walikota Surakarta kala itu, Joko Widodo, untuk mengembangkan konsep SCTC menjadi lebih luas cakupannya dan menambah bidang-bidang keterampilan yang diperlukan untuk pemenuhan pengembangan teknologi masa depan yang dinamakan Solo Technopark atau selanjutnya dikenal dengan STP. Konsep inipun digagas sejak tahun 2006.

Hingga kini, Solo Technopark yang berada di Pedaringan, Jebres, Solo, Jawa Tengah itu diarahkan sebagai pusat pendidikan dan teknologi, pusat riset, pusat pelatihan, dan pusat inkubasi produk baru, serta pusat industri dan perdagangan. Solo Technopark dirancang untuk menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah, yang sarat dengan teknologi. Bidang fokus yang diprioritaskan dalam proses inkubasi mencakup: bioenergy, pengolahan rumput laut (karagenan), waste treatment, serta industri kreatif (batik). (IN)

SOLAR CELL UNTUK RUMAH HUNIAN

Energi surya telah dimanfaatkan di berbagai negara. Masyarakat pun telah banyak merasakan manfaat dari energi alternatif ini. Energi listrik dari tenaga surya juga bisa dipasang di rumah.

Setiap orang pasti ingin sekali memiliki rumah idaman atau impian. Rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama keluarga tentu tak hanya sekedar bagus namun mampu membuat penghuninya nyaman dan bahagia. Keindahan dan kemegahan sebuah rumah tentu membutuhkan beragam fasilitas penunjangnya. Tersedianya energi listrik menjadi keharusan di setiap rumah.

Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di zaman modern sekarang ini. Saat ini mayoritas energi listrik yang dinikmati rumah tangga di Indonesia masih dihasilkan dari pembakaran sumber daya yang tidak terbarukan. Padahal ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis dan dampak pembakarannya pun menghasilkan emisi yang mempercepat laju pemanasan global.

Permintaan masyarakat untuk listrik semakin hari semakin besar. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran terjadinya krisis energi listrik di masa mendatang. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan cahaya matahari. Secara geografis letak Indonesia di Garis Khatulistiwa sekaligus sebagai Negara Tropis. Mengapa tidak dimaksimalkan saja penggunaan cahaya matahari yang diberikan gratis oleh Tuhan.

Untuk itu, selain melakukan penghematan, jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan menciptakan energi alternatif. Salah satunya dengan membuat pembangkit listrik sendiri di rumah.

Cara ini dimungkinkan dengan melakukan pemasangan panel



surya/solar cell. Solar cell dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik. Listrik tersebut disimpan di dalam aki dan dapat digunakan untuk menghidupkan lampu.

Negara Indonesia memiliki kekayaan cahaya matahari. Secara geografis letak Indonesia di Garis Khatulistiwa sekaligus sebagai Negara Tropis. Mengapa tidak dimaksimalkan saja penggunaan cahaya matahari yang diberikan gratis oleh Tuhan.

Meski demikian, dalam penggunaan solar cell untuk membangkitkan listrik di rumah perlu dipertimbangkan beberapa hal karena karakteristik dari panel surya / solar cell:

Solar cell tentu memerlukan sinar matahari sehingga penempatannya pada posisi dimana tidak terhalangi oleh objek sepanjang pagi sampai sore. Solar cell akan menghasilkan listrik arus searah DC sehingga untuk efisiensi yang lebih tinggi sebaiknya gunakan lampu DC seperti lampu LED. Selain itu, perlu dilakukan instalasi kabel baru khusus untuk arus searah DC untuk perangkat yang ada.

Jika rumah berupa bangunan baru disarankan untuk menggunakan PLN dan solar cell. Solar cell cukup digunakan untuk sebagian penerangan (dalam hal ini menggunakan arus searah DC) dan PLN untuk perangkat arus bolak balik AC seperti: Air Conditioning, Lemari Es, sebagian penerangan dll.

Perkembangan teknologi solar cell saat ini dapat digunakan untuk penutup atap mengganti genteng. Jika selama ini fungsi atap pada umumnya adalah untuk melindungi sebuah rumah dari cuaca, panas matahari, debu dan hujan. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi fungsi atap bukan hanya sekedar melindungi rumah dan penghuninya dari berbagai masalah yang datang dari atas.



Beberapa tahun ke depan atap sekaligus berfungsi sebagai pembangkit listrik. Genteng pembangkit listrik ini tidaklah benar-benar sebuah genteng yang biasa ditemui saat ini. Akan tetapi hanya berupa penamaan saja karena genteng pembangkit listrik ini diletakkan di atas atap biasa.

Daya listrik yang dihasilkan oleh atap Solar cell tersunt akan mampu mencukupi kebutuhan listrik sebuah rumah. Dengan demikian kebutuhan akan listrik PLN tidak lagi dominan dan beban tagihan listrik bulannya pun tak bikin pusing terlebih dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik.

BISA PASANG SENDIRI

Sebenarnya energi alternatif terbarukan seperti sinar matahari sudah makin diminati. Akan tetapi belum banyak orang yang mengetahui bagaimana aplikasi solar panel untuk konsumsi ritel atau perumahan. Panel matahari terdiri dari beberapa jenis, diantaranya tipe Monocrystal, Polycrystal, dan Thin Film. Masing-masing tipe memiliki kekuatan penyerapan radiasi matahari yang berbeda, tergantung

besarnya panel dengan satuan ukuran Watt Peak (Wp).

Ada dua jenis Instalasi panel surya yang bisa diterapkan, masing-masing berkaitan dengan peralatan pendukung yang digunakan. Ada sistem On Grid System Installation atau instalasi panel surya tanpa menggunakan baterai yakni peralatan yang digunakan adalah On Grid Inverter yang bisa di koneksi langsung dengan sumber listrik dari PLN atau sumber listrik lain.

Selain itu ada juga sistem Off Grid System Installation atau instalasi panel surya menggunakan baterai. Jika memakai Instalasi Off Grid dengan sistem DC, peralatan yang digunakan adalah panel surya, controller, dan baterai. Bila ingin mengubahnya menjadi arus AC, harus ditambahkan inverter.

Proses pemasangan atau penginstalan peralatan-peralatan tersebut, bisa dilakukan sendiri terutama untuk panel surya dengan kapasitas kecil (60 Wp). Namun jika instalasi untuk skala besar dan terkoneksi dengan banyak jaringan dibutuhkan keahlian khusus untuk proses instalasinya. (dbs)

PENGUATAN KAPASITAS KETERAMPILAN SOSIAL GURU DI ABAD INFORMASI

Muhammad Ivan, S.Pd*

“Social networking, mobile technology and digital literacy are part of their regular, everyday lives and we are doing them an injustice if we don’t include it in our daily teaching.”

Dunia cyber telah memasuki era paling mutakhir, menggeser komunikasi fisik ke tempat yang lebih privat, terkomunalisasi, dan horisontalisasi. Guru primitif yang tidak menyadari perubahan ini, perlahan akan ditinggalkan. Orang tua sejak dini sudah memperkenalkan tablet pada anak-anaknya, karena dinilai lebih edukatif, entertain dan atraktif. Kalau yang lebih edukatif, entertain dan atraktif ini sudah mengakomodir kepentingan anak lalu bagaimana sekolah dapat cepat tanggap untuk menghadapi problematika baru akibat hadirnya media baru seperti *social media* (socmed) dan *social networking* (socnet). Inilah tantangan bagi pemerintah (daerah) dan sekolah untuk mengubah paradigma guru menjadi lebih kredibel dalam mendayagunakan sumber media baru untuk pembelajaran.

Dinamika yang selalu berubah dalam ilmu pengetahuan, tak selamanya langsung bersinergi dengan buku teks. Tiap detik selalu ada peristiwa dalam sosial budaya masyarakat, situasi politik lokal sampai global, sampai gaya hidup artis yang dijadikan pegangan hidup remaja, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, dan siswa tidak selalu dapat menangkap hal-hal baru tersebut dengan bijak. Ironis sekali, jika seorang guru justru melakonkan dirinya persis sebagaimana siswa memaknai perubahan tersebut, tanpa filter, tanpa kritik, dan tanpa pemikiran yang

mendalam serta keterhubungannya dengan bidang studi di zaman informasi ini. Terlebih, sebagaimana data yang dilansir dari Kominfo (2014) bahwasanya pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun.

Kalau begitu, bagaimana guru sebagai *immigrant technology* yang berada di setengah kehidupan purba tanpa socmed dan socnet, dan kemudian harus beradaptasi dengan media baru tersebut dengan kemampuan yang belum dapat dipahami secara baik dan benar, holistik dan komprehensif, dan bahkan memerlukan pelatihan-pelatihan lebih lanjut. Sungguh berbeda, dengan generasi tahun 2000-an yang belum bisa bobo kalau belum update status di facebook, yang aneh rasanya kalau belum berkicau di twitter, dan yang sering merasa jenuh kalau tiba-tiba sinyal pergi dan tak kembali. Bagi generasi ini, mungkin lebih baik menjadi fakir miskin daripada fakir sinyal, karena kehidupan mereka yang sudah berpindah dari nyata ke maya. Yang riil itu maya, sementara yang palsu itu berada dalam kenyataan.

Di ranah yang berbeda, pendidikan adalah pendorong utama regeneratif ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan

peran penting yang setara karena itu adalah kendaraan untuk membagi pengetahuan ke seluruh dunia tetapi juga dikembalikan dalam umpan balik. TIK membantu pendidik profesional untuk memeriksa kembali beberapa asumsi awal mereka tentang relevansi, kesetaraan, dan efektifitas, jika perlu, membuat perubahan yang dibutuhkan untuk memperkaya kualitas sumber dari mana pengetahuan itu didapatkan pertama kali.

KOMPETENSI SOSIAL GURU

Guru lampau yang telah masuk ke dalam dimensi TIK, tentunya sangat mudah memaknai dimensi pembelajaran masa kini. Dengan hanya menggunakan smartphone, tablet, dan laptop, tugas observasi dapat langsung diperlihatkan dalam jejaring sosial atau blog. Bukan hanya siswa dari kelas tersebut yang dapat menikmati hasil observasi, namun seluruh dunia pun bisa menikmati bagaimana cara pandang siswa terhadap satu fenomena.

Ketakutan seorang guru terutama yang biasa terjadi dalam Kelompok Kerja Guru atau KKG salah satunya disebabkan penyelenggaraan KKG yang dilakukan masih belum dapat melepaskan dari sistem birokrasi pemerintah daerah, sehingga menempatkan KKG sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru masih tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang

sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan guru setempat. Dengan demikian KKG kehilangan kemandirian, motivasi dan insiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan profesionalisme guru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan nasional.

Dengan persoalan akut yang demikian, sistem pembelajaran holistik berbasis TIK dalam institusi persekolahan memang belum secara merata dapat diterapkan, selain membutuhkan biaya yang sangat besar untuk fasilitas dan berbagai pengembangan teknologi di sekolah lainnya, guru sebagai imigran teknologi pun masih terbatas jumlahnya. Perubahan ini menyerukan bahwa kesempatan berotonomi kepada sekolah dan guru untuk melakukan terobosan yang dilakukan secara individual (sekolah maupun guru bidang studi tertentu) tanpa menurunkan kinerja dan hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Guru yang telah menyebrang menjadi imigran teknologi harus memperhatikan perihal anak-anak yang telah bermigrasi lebih awal di era digital. Bahwa menurut data statistik dari Population Reference Bureau (2012) itu, sebagian besar dari mereka (sekitar 71%) tinggal di wilayah perkotaan. Mereka masuk kategori native digital (Prensky, 2001) atau N-Generation (Mabrito & Medley, 2008) yang lahir setelah tahun 1982. Seluruh hidupnya dikelilingi oleh peralatan komputer, videogame, email, internet, dan pesan instan (instant messaging). Cara generasi ini mempelajari pengetahuan juga berbeda. Ada tiga cara belajar mereka, yaitu: 1) Langsung mengalami dan melakukan (*experiential learning*); 2) Kerja tim; dan 3) Menggunakan jejaring sosial (*social networking*) (Oblinger & Oblinger, 2005).

Tentu saja, kompetensi sosial guru dipertaruhkan dalam suasana yang

berbeda jauh dari masa sebelumnya. Ada beberapa perubahan paradigma mengenai kompetensi sosial guru yang bergeser dari dunia fisik ke dunia maya, yakni:

Di masa kini, guru yang pandai berkomunikasi bukan yang selalu lantang berbicara tentang keilmuannya di kelas, namun juga mampu menepikan keilmuannya dalam teks yang terhubung dengan video di youtube dan multi referensi dari berbagai sumber yang kemudian diupload dalam blog atau web pribadinya. Guru dengan kompetensi sosial yang mumpuni tidak hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban, namun juga menjalankan relasi guru-siswa yang baik ketika di luar kelas.

Guru yang baik di era baru ini, bukanlah guru yang serba bisa, namun guru yang bisa membaca animo para siswa terhadap keilmuannya. Guru yang dapat menjawab kegelisan siswa lewat berbagi pengalaman dan status yang inspiratif bagi siswa di facebook atau twitter. Oleh karenanya, pesan yang baik akan lebih diterima siswa ketika guru dapat belajar menjadi teman yang baik dari siswa. Semakin inklusif seorang guru, maka penerimaan siswa akan semakin baik terhadap guru tersebut. Model relasi kuasa guru-murid dan dosen-mahasiswa sudah tidak relevan lagi. Media sosial (FB, Twitter, BBM, Path, Instagram, Youtube) mendekonstruksi guru-guru tiran. Bahkan sangat mudah bagi siswa untuk mengadukan guru cabul, guru error, guru dengan istilah negatif lainnya melalui socmed.

Terjadinya pergeseran tadi dari inklusivitas dan horisontalisasi menghadirkan terjadinya pergeseran dari individual ke sosial. Guru dan siswa menyatu dalam komunitas yang memiliki kecenderungan yang sama terhadap sesuatu, apakah itu hobi, menjadi rekan dalam klub pustaka di internet seperti goodreads Indonesia.

Kompetensi sosial ini akan luntur apabila guru justru menjadi “ember”,

dengan memberitahukan hal-hal negatif yang terjadi pada siswa. Ini malah membuat siswa tidak punya ruang ekspresi, sehingga hal-hal yang jujur, seperti kebencian terhadap guru tertentu atau kritik terhadap pelayanan dan kualitas sekolah, bukan menjadi evaluasi tapi diartikan sebagai penghinaan terhadap sekolah. Inilah mengapa ada kasus siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena menghina sekolah.

Dengan memperhatikan bagaimana mereka terhubung di dunia maya secara online dan *real time*, memamerkan kenarsisan sebagai status dan simbol diri, bermain monster-monster digital yang dimainkan oleh rekan-rekannya dari negara-negara yang berbeda dalam *online games*, mengeluh, dan berbelanja di dunia maya.

Watak digital yang sudah tersetel secara alami pada generasi saat ini adalah sebuah keniscayaan. Tantangan bagi calon guru dan guru yang sudah menahbiskan dirinya di dalam dunia pendidikan tidak bisa imun dengan zaman digital yang berciri 1) dinamika yang serba cepat berubah (*vitality*), 2) penuh ketidakpastian (*uncertainty*), 3) rumit penuh komplikasi (*complexity*), dan 4) membingungkan (*ambiguity*). Dengan tantangan seperti itu, maka guru harus mengubah paradigma pembelajarannya menjadi lebih ramah dan menyenangkan. Guru imigran digital berperan vital sebagai pemberi arah bagi calon nakhoda (siswa) yang mengendalikan kemudi kapal besar bernama Indonesia di masa mendatang.

Akhir kata, seorang guru yang baik akan beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Jika seorang guru telah berhasil menjadi imigran digital maka ilmu pengetahuan yang diajarkan sesuai zamannya, akan lebih mudah diterjemahkan dan dimaknai oleh generasi di zaman tersebut.

**Kandidat Magister Ilmu Komunikasi FISIP UI/Staf Asisten Deputy Dikdas, PAUD, dan Dikmas*

SULSEL GELAR GEBYAR PERIZINAN GRATIS

Proses pengajuan izin yang bisa dilayani hanya dalam satu hari kerja dan bebas biaya atau gratis diharapkan memberi dampak bagi kemajuan usaha di masyarakat.



Mengurus perizinan di Indonesia selama ini masih dinilai sulit dan berbelit-belit. Selain prosesnya yang lama juga dibutuhkan biaya yang besar. Padahal melalui perizinan yang cepat dan mudah maka pengusaha dapat berkembang dengan cepat. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan kemudahan modal dari perbankan dan instansi lainnya.

Namun kini pemerintah telah melakukan terobosan besar dalam proses pembangunan dengan cara penerapan Perizinan Gratis. Pelopornya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan yang kemudian dinilai layak menjadi proyek percontohan nasional. Penyelenggaraan Gebyar Perizinan Gratis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan yang pertama kalinya digelar di Indonesia. Selama penyelenggaraannya, Gebyar perizinan gratis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulsel diserbu warga kabupaten/kota. Terbukti lebih dari 36 ribu izin dikeluarkan untuk 7.500 pelaku usaha. Jumlah itu melebihi target sebelumnya 30 ribu izin.

Pelaku usaha tidak lagi kesulitan dalam mengajukan izin karena

akan dilayani hanya dalam satu hari kerja dan bebas biaya atau gratis. Izin dasar gratis yang ditawarkan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Wajar saja jika gebyar itu langsung diserbu masyarakat sebab selain gratis, pelayanannya juga cepat. Selain itu, guna mendukung sarana dan prasarana program perizinan gratis ini, maka pemerintah provinsi juga mendirikan kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk Tenaga Kerja Indonesia dan juga kantor kas BKPM.

Gebyar Perizinan Gratis ini juga dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Crisnandi. Dalam sambutannya, Menpan RB, mengimbau gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia agar memetik pelajaran dari penyelenggaraan perizinan di Sulsel.

Meski sudah banyak provinsi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terangnya, namun PTSP yang terintegrasi dengan kabupaten dan kota hanya di Sulsel. Untuk itu, dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, secara langsung berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Bupati dan gubernur dari seluruh Indonesia harus belajar dari Sulsel.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa program Gebyar Perizinan Gratis merupakan bagian dari upaya memberi stimulan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM, sangat penting untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas karenanya perhatian yang serius perlu diberikan untuk mendukung UMKM.

Di samping itu, Syahrul juga menyebutkan bahwa PTSP Sulsel melayani 120 jenis izin dengan 20 sektor. Dirinya berharap, PTSP yang ada di daerah bisa mengikuti bahkan melebihi pelayanan PTSP yang ada di provinsi.

"Kalau tadinya masyarakat dalam mengurus izin pindah-pindah kantor, sekarang tidak lagi. Sepanjang berkasnya lengkap, pengurusan izin tidak lagi menghitung bulan, minggu, dan hari tapi menghitung waktu. Tapi tentu saja tidak serampangan dalam pemberian izinnya," tegasnya.

SERENTAK DAN ANTUSIAS

Gebyar Perizinan Gratis 2015 yang digelar juga disambut antusias warga yang ada di kabupaten kota se-Sulsel. Di kabupaten Pangkep misalnya, sudah sebulan terakhir diberlakukan secara gratis untuk beberapa perizinan yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro. Pada acara gebyar ini, Pangkep menggratiskan empat macam perizinan masing-masing izin gangguan (HO), surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP).

Di Pangkep animo masyarakat melegalkan usaha mereka tergolong sangat tinggi Sejak persiapan awal April lalu hingga Kamis 7 Mei tercatat sebanyak 663 permohonan izin gratis

dengan rincian 255 izin gangguan, 204 izin usaha perdagangan (SIUP) dan 204 izin tanda daftar perusahaan (TDP). Mereka yang bermohon perizinan didominasi sektor usaha kecil dan mikro.

Animo masyarakat Kabupaten Jeneponto juga tidak kalah tinggi pada Gebyar Perizinan Gratis.. Pelayanan diserbu masyarakat yang ingin mengurus izin usaha, mumpung gratis dan bisa selesai dalam sehari. Kabupaten Jeneponto bahkan paling produktif dengan mengeluarkan 4.783 izin. Di tempat kedua tercatat Barru dengan 3.760 izin, sedangkan Makassar di posisi ketiga sebanyak 3.302 izin.

Pemandangan yang sama juga terlihat di Pelataran Terminal Callaccu Sengkang Kabupaten Wajo. Sebanyak 1.370 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendaftarkan izin usaha dan izin dasar lainnya dalam penyelenggaraan Gebyar Perizinan Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM). Pelaksanaan gebyar perizinan

gratis tersebut mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi.

Sementara itu, program yang sama di kabupaten Palopo bahkan over target. Awalnya pemkab setempat hanya mentargetkan 200, namun yang terealisasi justru sebanyak 1.506 izin atau 753 persen.

Gebyar Perizinan Gratis memang dilaksanakan serentak sehari pada 7 Mei lalu. Namun banyak daerah yang mulai mempersiapkan selama sebulan. Kegiatan ini dilaksanakan satu hari dengan tujuan, memberikan kemudahan izin kepada pelaku UMKM di daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya izin sebelum memulai usaha.

Di samping itu juga memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai akses kredit perbankan, kepemilikan NPWP, serta informasi tentang pengembangan dan jaringan usaha. Dengan adanya izin maka suatu usaha sudah memiliki legalitas, keberadaan sudah formal. Itu sudah jadi pintu masuk untuk mengakses perbankan. (yn/dbs)

Sukseskan!!!

GEBYAR PERIZINAN GRATIS 2015

7 MEI 2015

BKPM TOWER
JL. BOUGENVILLE NO. 5 MAKASSAR

Serempak di 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan

Logos: USAID INDONESIA, KINERJA, Bank Sulselbar, BRI, Mandiri, BNI, BULOG, BPJS Ketenagakerjaan.

Text: Melayani & Memahami

BELAJAR MAJU DARI BUDAYA JEPANG

Jepang selalu dianggap sebagai model negara yang sukses menjalankan modernisasi sembari merawat unsur-unsur tradisinya yang penting. Karena itu, negara-negara berkembang melirik Jepang sebagai teladan yang perlu dicontoh.

Era Perang Dunia II (PD II) Jepang merupakan Negara yang luluh lantah lantaran bom atom yang dijatuhkan tentara sekutu (Amerika Serikat) di Kota Hiroshima dan Nagasaki. Praktis, peristiwa tersebut menghancurkan Jepang secara nasional dan sekita itu juga tepatnya pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Pasca kekalahannya pada PD II, Jepang ibarat Negara 'pesakitan' dibawah bayang-bayang Amerika Serikat (AS). Amerika dengan sukses melucuti kekuatan-kekuatan, persenjataan, dan perekonomian Jepang yang didominasi oleh klan. Bahkan hukum yang berlaku adalah hukum sekutu. Singkat kata betapa terhina dan terpuruknya menjadi Negara yang kalah perang.

Semangat bangsa Jepang yang dilandasi oleh budaya yang luhur telah mengangkat kembali negara ini dari keterpurukannya akibat perang. Dalam masa tidak lebih dari sepuluh tahun Jepang mampu tegak kembali dan

bersaing di dunia internasional, yaitu dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo 1964, yang juga menjadi simbol atas kebangkitan Jepang dan pada tahun 1975 Jepang sudah diakui menjadi negara maju serta masuk dalam kelompok negara G-7.

30 tahun kemudian (1980-an) produk-produk Jepang yang lebih murah dan berkualitas tinggi menyerbu pasar dunia dan menghancurkan industri utama AS. Sejak saat itu Negara Jepang menjadi negara yang maju yang diperhitungkan dan dimasukkan kedalam 5 negara dengan perekonomian yang paling kuat setelah AS. Lantas apa rahasia kemajuan Jepang?

AKAR BUDAYA

Secara geografis Jepang adalah negara yang sangat minim sumber daya alam, namun negeri ini mempunyai begitu banyak keunggulan sehingga disebut sebagai negara 'Macan Asia'. Keunggulan Jepang itu sebenarnya banyak

dipengaruhi oleh budaya yang melekat pada seluruh lapisan masyarakatnya yaitu budaya yang di berasal dari para Samurai yang disebut *bushido*. Namun, budaya tersebut tidak muncul begitu saja ada proses sejarah panjang yang membentuknya.

Proses modernisasi Jepang biasanya dilacak sejak Restorasi Meiji (awal abad XIX), ketika para samurai yang berpikiran maju menghendaki Jepang yang modern. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, sebetulnya Restorasi Meiji juga bisa sukses ketika sudah melewati masa *jengoku jidai* (masa perang) zaman Tokugawa (sekitar abad XV-XVII). Setelah selesainya era Tokugawa yang penuh perang, Jepang mengalami masa damai selama 200 tahun. Dan itulah modal besar yang dimiliki Jepang untuk mendidik bangsanya.

Ketika terjadi perang terus-menerus, para samurai memang banyak kerjaan. Tapi ketika memasuki era damai selama 200 tahun, mereka tidak lagi punya kerjaan. Tapi uniknya, mereka bukannya jadi *gangster* atau setara preman bayaran, tapi mengabdikan diri sebagai guru. Mereka mendidik anak-anak orang kaya, terutama kelas pedagang, karena Jepang waktu itu memang berkelas-kelas.

Keuletan dan kesabaran para Samurai dalam mendidik masyarakat tentunya tidak terlepas dari falsafah budaya Bushido yang diyakini oleh para samurai. Adapun Bushido dapat diartikan sebagai 'jalan hidup seorang prajurit atau ksatria yang diwarnai oleh semangat kebenaran, kegagahan, murah hati, mencintai sesama, tulus tanpa pamrih, menjaga kehormatan dan mengabdikan dengan loyal'.

Awalnya Bushido berwujud literatur lebih lanjut dalam memberlakukan persyaratan untuk melakukan diri dengan ketenangan, keadilan, dan kepatutan. Bagian lain dari filsafat bushido adalah mencakup bagaimana metode membesarkan anak, penampilan, dan perawatan. Namun semua itu juga dapat dilihat sebagai dari persiapan konstan seseorang menuju kematian yang baik dengan kehormatan yang utuh.

Aspek spiritual sangat dominan dalam falsafah bushido, seorang samurai memang menekankan kemenangan terhadap pihak lawan, tetapi tidak berarti dengan kekuatan fisik. Dalam semangat bushido, seorang samurai diharapkan mampu menjalani pelatihan spiritual guna menaklukkan dirinya sendiri, karena dengan menaklukkan dirinya sendirilah samurai dapat mengalahkan orang lain.

Jika dilihat dari sumbernya, nilai bushido berasal dari ajaran budhisme dan shintoisme. Dimana terdapat perasaan percaya, tenang terhadap nasib, pasrah terhadap hal-hal yang tak terelakan serta kesetiaan terhadap kaisar. Juga tidak ada konsep Sang Pencipta dan konsep dosa sehingga mati bunuh diri tidak ada sangkut pautnya

dengan nilai norma doktrin agama, yang ada hanya konsep karma dimana “perbuatan yang baik akan berakibat baik pula”.

Bushido telah terimplementasikan dengan baik dan sudah menjadi sistem kepribadian masyarakat Jepang, nilai-nilai tersebut yaitu :

1. Gi (integritas)

Senantiasa mempertahankan etika, moralitas dan kebenaran. Integritas merupakan nilai bushido yang paling utama. Kata integritas mengandung arti keutuhan meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini sangat dijunjung tinggi dalam falsafah bushido dan merupakan dasar untuk mengerti tentang moral dan etika serta menjalankannya secara utuh dan menyeluruh.

Integritas bisa diartikan kesempurnaan, kesatuan, keterpaduan atau ketulusan. Semua arti kata itu tepat sekali mendukung pembentukan sosok pribadi manusia sesuai yang diharapkan yaitu manusia “paripurna” atau secara sederhana ialah manusia yang penuh dengan “kemuliaan”.

Integritas seringkali ditujukan pada orang yang dianggap sudah baik secara mental maupun spiritual. Karena itu kata integritas melekat pada pribadi orang-orang yang “arif dan bijaksana” yang dalam kehidupan kesehariannya mampu menjadi sosok manusia panutan dan sebagai teladan. Bagi seorang pemimpin, integritas merupakan hal yang utama.

2. Yu (keberanian)

Keberanian merupakan asset yang berharga bagi siapapun yang hidup di dunia ini. Tanpa keberanian seseorang tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak akan meraih kesuksesan. Keberanian bisa menjadikan sesuatu yang dianggap mustahil menjadi kenyataan. Keberanian memungkinkan seseorang untuk keluar dari kesulitan dan bahkan berhasil meraih kesuksesan.

Seseorang yang batinnya memang pemberani akan menunjukkan loyalitas dan kasih sayang pada pimpinan dan orangtua. Mereka juga mempunyai kesabaran, sikap toleran, serta menghargai apa saja. Bukan dikatakan pemberani karena seseorang cepat meluapkan amarahnya. Seseorang pemberani adalah mereka yang dapat menguasai diri atau nafsunya sewaktu marah.

3. Jin (Murah Hati) Mencintai sesama, kasih sayAng dan simpati. Bushido memiliki aspek keseimbangan antara maskulin (yin) dan feminine (yang). Jin mewakili sifat

feminine. Meski berlatih ilmu pedang dan strategi perang, para samurai harus memiliki sifat pengasih dan peduli pada sesama manusia.

Sikap ini harus tetap ditunjukkan baik di siang hari yang terang benderang, maupun di kegelapan malam. Kemurahan hati juga ditunjukkan dalam hal memaafkan. Mencintai sesama, kasih sayang dan simpati.

4. Rei (Hormat dan Santun Kepada orang lain)

Bersikap santun dan hormat pada orang lain. Ksatria tidak pernah bersikap kasar dan ceroboh, namun senantiasa menggunakan kode etiknya secara sempurna sepanjang waktu. Sikap santun dan hormat tidak saja ditujukan pada pimpinan dan orang tua, namun kepada tamu atau siapa pun yang ditemui. Sikap santun meliputi cara duduk, berbicara, bahkan dalam memperlakukan benda ataupun senjata.

5. Makoto – Shin (Kejujuran dan tulus ikhlas)

Samurai mengatakan apa yang mereka maksudkan, dan melakukan apa yang mereka katakan. Mereka membuat janji dan berani menepatinya. Jujur dan tulus ikhlas merupakan kode etik samurai yang berarti berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Para ksatria harus menjaga ucapannya dan selalu waspada tidak menggonggong, bahkan saat melihat atau mendengar hal-hal buruk tentang siapapun.

6. Meiyo (menjaga nama baik dan kehormatan)

Samurai akan menghormati etika, bukan talenta. Dan mereka menghormati perbuatan, bukan pengetahuan. Salah satu cara mereka menjaga kehormatan adalah tidak menyia-nyiakan waktu dan menghindari perilaku yang tidak berguna. Jika anda di depan publik, meski tidak bertugas, kau tidak boleh sembarangan bersantai. Lebih baik kau membaca, berlatih kaligrafi, mengkaji sejarah, atau tata krama keprajuritan.

7. Chugo (kesetiaan pada pemimpin)

Kesetiaan ditunjukkan dengan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Kesetiaan seorang ksatria tidak saja saat pimpinannya dalam keadaan sukses dan berkembang. Bahkan dalam keadaan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, pimpinan mengalami banyak beban permasalahan, seorang ksatria tetap setia pada pimpinannya dan tidak meninggalkannya.

Puncak kehormatan seorang samurai adalah mati dalam menjalankan tugas dan perjuangan. Seperti sabda Rasulullah “engkau tetap harus setia mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun ia memukul punggungmu atau mengambil haratamu, maka tetaplah untuk setia mendengar dan taat”.

8. Tei (peduli)

Tak peduli seberapa banyak kau menanamkan loyalitas dan kewajiban keluarga di dalam hati, tanpa perilaku baik untuk mengekspresikan rasa hormat dan peduli pada pimpinan dan

orang tua, maka kau tidak bisa dikatakan sudah menghargai cara hidup samurai.

HANSEI DAN KAIZEN

Falsafah Bushido juga telah melahirkan prinsip Hansei dan Keizen. Kedua prinsip tersebut telah banyak diterapkan dalam dunia usaha di Jepang sehingga tidak heran kekuatan dunia usaha Jepang diakui dunia.

Hansei adalah refleksi untuk menemukan akar setiap masalah, dan Kaizen adalah menemukan solusi terbaik atas setiap masalah sampai sekecil-kecilnya. Kedua kunci penting ini merupakan filosofi hidup bangsa Jepang yang telah mengakar dan menjadi sokoguru bangkitnya perekonomian Jepang.

dari seluruh penyebab itu yang disebut penyebab utama.

Lalu dengan diskusi mendalam, dirumuskanlah solusi dari akar masalah itu dan diuji coba berulang-ulang hingga ditemukan solusi yang paling efektif dan dengan waktu yang paling singkat. Inilah ‘seni’ yang disebut Hansei.

Adapun prinsip Kaizen harus mencakup beberapa elemen kunci, yaitu kualitas, efisiensi, dan waktu.

Perbaikan yang dimaksud kaizen bukanlah perbaikan yang dilakukan langsung, drastis dan ekstrem dalam waktu singkat tetapi perbaikan-perbaikan berskala kecil dan sederhana, namun dilakukan terus-menerus secara konsisten dalam jangka waktu yang lama.

Perwujudan sistem kerja berlandaskan falsafah Kaizen ini dilakukan dengan mendorong semua perangkat organisasi untuk menyumbangkan saran, ide dan pendapat sebanyak-banyaknya untuk kemudian dipertimbangkan dan diterapkan sehingga mampu meningkatkan standar kerja yang berlaku. (DAM)

Pontianak:

ANTARA TINGGINYA TUGU KHATULISTIWA DAN PANJANGNYA ALIRAN KAPUAS

Menjadi salah satu kota dengan suhu terpanas di Indonesia, Pontianak jauh dari kondisi kering dan tandus karena nyatanya disetiap sudut kota dihiasi dengan hutan hujan tropis yang membingkainya.



Pontianak merupakan satu-satunya kota di dunia yang berada tepat di bawah garis imajiner yang disebut garis khatulistiwa. Garis ini yang memisahkan belahan bumi bagian utara dengan belahan bumi bagian selatan sehingga tidak heran kota ini terasa panas apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Jadi saya sarankan agar menggunakan sunblock apabila ingin berjalan-jalan pada siang hari.

Sebagai kota yang dilintasi garis imajiner, Pontianak menjadi kota yang cukup istimewa, sehingga pada tahun 1928 tim ekspedisi

yang dipimpin oleh seorang ahli geografi dari Belanda membangun sebuah tugu sebagai penanda yang dinamakan tugu khatulistiwa. Dan kini tugu tersebut telah menjadi icon kebanggaan Pontianak yang wajib dikunjungi apabila datang ke Pontianak.

Di tugu khatulistiwa kita juga dapat menyaksikan fenomena alam yang langka berupa kulminasi matahari dimana posisi matahari pas berada digaris khatulistiwa. Pada saat itu kita akan mendapatkan fenomena hilangnya bayang-bayang benda beberapa saat dan waktu yang tepat untuk dapat menyaksikan fenomena

alam tersebut adalah sekitar 21-23 Maret dan 21-23 September.

Pontianak juga menyuguhkan wisata sejarah yang lengkap, adalah Istana Kadriah dan Masjid Jami yang membuat Pontianak semakin menarik untuk dikunjungi. Istana Kadriah adalah bangunan peninggalan kerajaan pertama yang berdiri di Kota Pontianak. Istana ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Letaknya berada pada kawasan Tanjung Pertigaan sungai Kapuas dan sungai Landak.

Keseluruhan bangunan istana dibuat dengan kayu belian (dikenal juga sebagai kayu besi atau kayu ulin). Bangunan ini memiliki luasan 60 x 25 meter. Istana Kadriah memiliki zonasi yang terdiri dari empat zona, yaitu zona keraton, pemukiman kerabat, alun-alun dan area masjid. Arsitektur bangunan istana ini merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional melayu dengan Eropa dan juga dipengaruhi seni budaya Islam, terutama pada ornamen-ornamen kaligrafi.

Bangunan bersejarah lainnya yang wajib dikunjungi adalah Masjid Jami' yang hanya berjarak 300 dari keraton Kadriah. Masjid Jami' pernah mengalami pemugaran pada masa Sultan Syarif Usman atau Sultan Pontianak ke-3 pada tahun 1821. Masjid ini berukuran panjang 33 meter dan lebar 27 meter dengan halaman yang luas sebagai tempat pelaksanaan sholat jika bagian dalam tidak dapat menampung lagi.

Masjid Jami' bergaya arsitektur tradisional melayu yang dipadu dengan arsitektur Eropa dan seni budaya Islam. Bagian atap masjid ditopang oleh tiga pilar atau tiang utama berupa kayu belian berdiameter 60 cm yang pada saat ini sudah berumur lebih dari 170 tahun.

Tempat yang tidak boleh terlewatkan apabila ke Pontianak adalah Museum Pontianak. Museum ini merupakan tempat yang tepat



untuk menelusuri sejarah mula Kota Pontianak. Menjadi salah satu dari lima museum terbaik di Indonesia, Museum Pontianak menyajikan kekayaan sejarah dan budaya yang banyak orang abaikan. Artefak sejarah dan peninggalan budaya terjaga dengan baik.

Museum ini menyimpan di antaranya koleksi Geografika/ Geologika berupa peta dan jenis batu-batuan; koleksi biologika, arkeologika, historika, numismatika, dan keramologika berupa tempayan, piring, mangkuk, sendok, dll. yang berasal dari China, Vietnam, Jepang, Eropa, dan keramik lokal Singkawang. Selain menampilkan koleksi yang ada di Ruang Pameran Tetap I, Museum Provinsi Kalimantan Barat juga menampilkan koleksi replika dan miniatur yang berada di plaza Jangkar kapal dagang asing.

MENYUSURI KAPUAS

Agenda wajib saat menyambangi Pontianak adalah menyusuri Sungai Kapuas yang melegenda. Sungai dengan panjang sekitar 1.142 KM dan lebar mencapai 70-150 M ini menjadikan Sungai Kapuas sebagai sungai yang terpanjang di Indonesia dan termasuk pula salah satu yang terpanjang di Asia tenggara.

Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar di sungai Kapuas adalah mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan sungai Kapuas terjaga kelestariannya.

Untuk menikmati Keindahan sungai kapuas dan melihat secara langsung kegiatan masyarakat di setiap pesisirnya ini, kita bisa menggunakan kapal wisata yang terparkir di taman alun-alun kapuas, jalan Rahadi Oesman pontianak atau di cafe Serasan, Pontianak Timur.

Kapal wisata tersebut akan membawa kita mengarungi



keindahan kota pontianak dengan rute taman Alun-Alun Kapuas melewati masjid Jami Sultan Syarif Abburrahman Alkadri, jembatan kapuas satu hingga cafe Serasan dan kembali lagi ketempat dimana kita naik. Untuk dapat berlayar dengan Kapal wisata sungai kapuas ini, kita akan dikenakan biaya Rp10000 apabila kita naik dari kapal wisata yang berada disisi taman Alun-Alun Kapuas dan Rp 15000 apabila naik dari kapal wisata yang berada disisi cafe Serasan, Pontianak Timur.

Menyusuri sungai Kapuas memang terlihat biasa, namun kapal-kapal yang berlabuh dan lalu-lalang menawarkan daya tarik yang unik. Apalagi di atas sungai dapat pula menyaksikan etalase budaya di kedua sisi. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih menarik lebih baik jika kita menelusuri sungai sebelum Matahari terbenam jadi Anda bisa menyaksikan aktivitas hidup di sepanjang sungai. Nahkoda kapal biasanya akan membawa Anda menyeberangi garis khatulistiwa dan memberitahu bahwa Anda akan bergerak dari selatan ke arah utara.

SURGA KULINER

Setelah seharian keliling Pontianak dan menyusuri sungai Kapuas, rasanya tidak salah apabila malam harinya menyicipi aneka kuliner yang berada di jalan Gajah Mada. Ya kawasan jalan Gajah

Mada memang terkenal sebagai sentra kuliner di Pontianak. Disepanjang kawasan tersebut barbagai macam restaurant, cafe dan warung menawarkan makanan yang memanjakan lidah. Mulai makanan serba mahal dari restaurant mewah hingga yang ekonomis yang disediakan sejumlah rumah makan.

Walaupun kota Pontianak sudah banyak memiliki tempat hiburan umum tetapi jalan Gajah Mada tetap mempunyai penggemar dan harus masuk daftar kunjungan jika ke kota Khatulistiwa ini karena tempat ini disukai dari berbagai kalangan mulai dari yang muda hingga yang sudah tua, rakyat kecil hingga pejabat terutama jika di akhir pekan seperti malam minggu.

Buat anda yang tidak suka dengan kopi sebaiknya jangan mengurungkan niatnya untuk ke jalan Gajah Mada, panggilah pelayan rumah makan atau cafe dan pesanlah minuman favorit anda karena di jalan Gajah Mada tidak hanya menawarkan minuman kopi tetapi banyak lagi minuman lainnya seperti minuman khas kota Pontianak yang terbuat dari lidah buaya. Jika anda lapar pesanlah makanan yang ada di daftar menu dan jangan lewatkan untuk mencoba sensasi kuliner khas Pontianak seperti He Keng, Juhi Bakar, cai kue, bubur pedas dan lain sebagainya. Jadi tunggu apalagi ayo kita ke Pontianak. **(DAM)**

Dasar Hukum Kerjasama Kebudayaan ASEAN dan Rusia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (PERSETUJUAN KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation (Persetujuan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Federasi Rusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (PERSETUJUAN KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA

ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-
BANGSA ASIA TENGGARA DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation (Persetujuan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Federasi Rusia, yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2010 di Hanoi, Vietnam, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Rusia serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Rusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO



MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN

“Memastikan Indonesia menjadi Negara maju dan menjadi 12 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 dan menjadi kekuatan 8 ekonomi dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan”.



Itulah visi Indonesia 2025 yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia. Visi tersebut tentu bisa diwujudkan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mimpi itu juga tidak mustahil akan menjadi kenyataan World Bank menyatakan bahwa pada tahun 2014 yang lalu Indonesia telah menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Global Competitiveness Index Indonesia pun konsisten meningkat, dimana pada tahun 2013-2014

ada di posisi 38 sementara tahun sebelumnya di posisi 50 dunia.

Hal ini diungkapkan Deputy Koordinator Bidang Pendidikan Dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA saat memberikan kuliah umum dengan tema: “Dengan Kerja Sama Di Bidang Kependudukan Kita Wujudkan Pembangunan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Sumberdaya

Manusia” kepada civitas akademika serta wasana praja dan nindya praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Balairung Jenderal Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang Jawa Barat akhir April lalu.

“Coba saudara bayangkan. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tantangannya adalah bagaimana penguasaan kekayaan tersebut dan pengelolaannya agar memberikan nilai tambah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Lebih Lanjut, Agus mengungkapkan bahwa diperkirakan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran antara US\$ 4-6 mencapai 27,8 juta. Sementara penduduk dengan pengeluaran per hari antara US\$ 6-10 per hari mencapai 11,88 juta. Kekuatan kelas menengah yang besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Jika government spending yang tinggi didukung dengan consumers spending maka akan menciptakan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan perekonomian. Tentu saja ini semua harus disertai dengan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi kebocoran dan misallocation.

“Kondisi ini patut kita syukuri, kita pertahankan bahkan kita tingkatkan terus menerus. Penting



bagi kita semua untuk selalu fokus mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi kita harus meyakini akan visi atau cita-cita besar tersebut dan bersama berjuang untuk mewujudkannya," tegasnya.

Di sisi lain, terangnya, data kependudukan Indonesia menunjukkan adanya golden opportunity pada periode 2020-2035. Pada periode tersebut dependency ratio mencapai kondisi terendah. Inilah yang disebut dengan "bonus demografi". Kondisi ini merupakan kesempatan emas ini harus dapat dioptimalkan dengan dua syarat. Pertama, harus mampu menyediakan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan. Kedua, harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya revitalisasi program keluarga berencana.

"Bila kita gagal mengelola peluang emas ini, maka kita tidak akan mendapatkan "bonus demografi" melainkan yang akan terjadi adalah "bencana demografi"," ujarnya.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Selama ini Pemerintah bersama dengan berbagai pihak telah berupaya keras untuk membangun manusia Indonesia melalui pendidikan. Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun, menyediakan

Bantuan Operasional Sekolah, dan menyediakan Bantuan Siswa Miskin. Hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus meningkat dari 72,27 pada tahun 2010 menjadi 73,81 pada tahun 2013 yang lalu.

Namun demikian, jika dilihat dari data dari Badan Pusat Statistik, sampai dengan tahun 2013 lalu, dari sekitar 247 juta jiwa penduduk, status tingkat pendidikan atau kepemilikan ijazah penduduk usia diatas 15 tahun masih belum menggembirakan. Dari data tersebut terlihat bahwa sebanyak 15% atau sekitar 25 juta jiwa tidak memiliki ijazah, dengan kata lain tidak sampai menamatkan pendidikan SD atau yang sederajat, sebanyak 35% atau sekitar 58,8 juta jiwa berijazah SD/sederajat, sebanyak 21% atau sekitar 34,8 juta jiwa berijazah SMP/sederajat, sebanyak 23% atau sekitar 38,5 juta jiwa berijazah SMA/ sederajat.

Di sisi lain, sekitar 70% tenaga kerja kita hanya berpendidikan setingkat SMP ke bawah, atau sekitar 90% tenaga kerja kita hanya berpendidikan setingkat SMA ke bawah. Rata-rata lama studi masyarakat kita baru mencapai 8,2 tahun. Kondisi ini akan mempengaruhi daya saing tenaga kerja kita dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana arus pasar tenaga kerja akan

mengalir bebas diantara sesama negara ASEAN.

Untuk itulah, papar Agus, Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan manusia ini dengan meluncurkan program Pembangunan Keluarga Sejahtera. Presiden juga telah meluncurkan Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program-program lain melalui kementerian/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan visi Jokowi-JK untuk 5 tahun kedepan, yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi itu akan diwujudkan melalui 9 Agenda Strategis yang disebut NAWACITA yang telah dijabarkan di dalam RPJMN 2015 – 2019 sehingga setiap daerah pun akan menyesuaikan RPJMD mereka dengan NAWACITA tersebut.

Pemerintah menginginkan tidak ada lagi anak berusia 6-21 tahun yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah. KIP pun tidak hanya berlaku untuk pendidikan formal di sekolah-sekolah dan madrasah, tetapi juga berlaku untuk pendidikan di Pondok-Pondok Pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. Program ini sejalan dengan Wajib Belajar 12 Tahun untuk mendongkrak APK jenjang pendidikan menengah. KIP diberikan bagi anak-anak berusia 6-21 tahun dari keluarga yang kurang mampu. Untuk tahun 2015 ini, KIP akan dibagikan kepada 20,3 juta anak, dengan nilai anggaran sekitar 13 Trilyun Rupiah. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahun 2014 lalu.

"Kita menyadari perlunya menyiapkan generasi muda saat ini menjadi SDM yang berkualitas menuju bangsa yang sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing pada 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045 nanti," tegasnya. (yn/dbs)

Cerdas Keuangan dengan SiMOLEK

Literasi keuangan kepada masyarakat sudah harus giat dilakukan. Selain untuk memudahkan akses, agar masyarakat juga makin cerdas terhadap aneka produk jasa keuangan.

Salah satu komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia supaya dapat mengelola keuangan dengan baik. Maka, bersama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Mobil Edukasi Keuangan atau disingkat

SiMOLEK medio Mei 2015 lalu. 21 mobil yang diluncurkan hari itu menambah 20 mobil yang sudah diluncurkan sebelumnya.

Menko PMK, Puan Maharani, dalam sambutannya mendorong lembaga jasa keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat berupa edukasi

terutama mengenai pentingnya mengelola keuangan yang baik.

“Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke jasa keuangan. Itu terjadi salah satunya karena keterbatasan pengetahuan di masyarakat. Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat melek keuangan,” kata Menko PMK.



“Memang bukan hal yang mudah. Namun, keberadaan SiMOLEK ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mobil SiMOLEK ini harus bisa hadir hingga di kantor-kantor desa, kelurahan, dan kecamatan.”

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D Haddad, menjelaskan, program literasi keuangan meliputi tiga pilar. Pilar pertama adalah edukasi dan kampanye literasi keuangan. Pilar ini menyasar antara lain ibu-ibu rumah tangga, calon dan para TKI, pelajar, mahasiswa, akademisi, Majelis Taklim, kelompok pesantren, dan para pelaku UMKM.

Pilar Kedua, berupa penguatan infrastruktur literasi keuangan yang mencakup pelaksanaan survei literasi keuangan yang akan dilakukan secara reguler, pembentukan layanan keuangan terintegrasi yang akan memberi informasi dan menerima aduan konsumen dan masyarakat terkait dengan berbagai isu lembaga keuangan beserta layanan dan produknya.

“Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan situs atau website yang berisi informasi dan edukasi keuangan serta menyiapkan mobil literasi keuangan yg kita sebut sebagai SiMolek yang akan beroperasi di seluruh Indonesia, termasuk di derah yang selama ini sulit mendapatkan akses informasi dan edukasi jasa keuangan,” papar Muliaman.

Adapun pilar ketiga adalah pengembangan produk dan layanan jasa keuangan. Dalam implementasinya, OJK mendorong industri untuk menciptakan dan terus mengembangkan berbagai produk dan jasa yang terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk program pemberdayaan.

“Saat ini sudah terdapat beberapa produk dan layanan berbiaya rendah dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan

rendah diantaranya asuransi mikro dengan harga polis berkisar antara Rp10 ribu - Rp50 ribu. Asuransi mikro ini di antaranya asuransi untuk demam berdarah yang bisa dibeli oleh masyarakat ketika demam berdarah tiba,” ujar Muliaman lagi.

Sementara menurut Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Setiono, Kegiatan operasional SiMOLEK didukung oleh oleh mesin genset, sehingga dapat lebih maksimal melayani konsumen dan masyarakat di daerah terpencil.

SiMOLEK telah mengunjungi pasar-pasar dan sekolah-sekolah. Selain itu, OJK juga senantiasa mengikutsertakan SiMOLEK dalam setiap ajang edukasi keuangan yang diselenggarakan di daerah serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, seperti pasar rakyat.

“Berbagai fitur dan fasilitas dapat dijumpai pada SiMOLEK, yaitu bahan mengenai edukasi keuangan mengenai produk, layanan dan lembaga jasa keuangan. Masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan ke Layanan Konsumen OJK.”

Sebagai sasaran utama literasi keuangan, sejauh ini diketahui bahwa Kaum Perempuan Indonesia bertanggung jawab atas 52 persen perencanaan keuangan dan 33 persen usaha kecil.

Tidak hanya itu, 57 persen pengguna produk dan layanan keuangan pun adalah perempuan. Sayangnya, survei OJK di tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya ada 18,84 persen perempuan Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Angka ini tentu masih kalah jika dibandingkan dengan tingkat literasi pria yang berada di kisaran 25 persen.

Selain Kaum Perempuan, OJK juga menyasar anak-anak siswa sekolah dengan program menabung setiap hari rabu di minggu pertama setiap

bulannya dengan nama ‘Simpanan Pelajar’ atau Simpel. Nantinya, Simpel akan dijalankan melalui SiMOLEK dan pelajar dapat menyetorkan uangnya kepada petugas SiMOLEK yang berkunjung ke sekolah-sekolah mereka.

“Kami pilih hari rabu karena sesuai dengan singkatannya Rajin Menabung (Rabu). Nanti kami akan *design* tabungannya seperti apa. Rasio tabungan di Indonesia dengan produk domestik bruto rendah di Asia Tenggara. Oleh karena itu dengan adanya program Simpel ini akan membuat anak-anak mempunyai *habbit* untuk menabung,” ungkap Muliaman.

Survei OJK juga menunjukkan bahwa penetrasi jasa keuangan di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Survei mencatat, sekitar 28,4 persen masyarakat tingkat bawah dan 51,6 persen masyarakat menengah ke atas yang baru memanfaatkan aneka produk jasa keuangan itu.

Adapun lembaga keuangan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain, perbankan yang berada di peringkat teratas yakni 21,8 persen (terdapat 22 orang dalam seratus orang), disusul asuransi 17,08 persen, pegadaian 14,85 persen, pembiayaan 9,8 persen, dana pensiun 7,13 persen, dan pasar modal 3,7 persen.

Sementara, penggunaan produk dan jasa keuangan masyarakat tertinggi adalah di sektor perbankan, yakni 57,28 persen, diikuti asuransi 11,81 persen dan pembiayaan 6,33 persen. sementara Pegadaian 5,04 persen, dana pensiun 1,53 persen, dan pasar modal 0,11 persen.

Namun, yang terpenting dalam program literasi keuangan adalah masyarakat tidak sebatas mau memanfaatkan produk jasa keuangan saja tetapi mau mengubah perilaku dalam menggunakan uang yang dimiliki. (IN)



INTERNASIONAL

SWEDIA (DINILAI) SUKSES TEKAN ANGKA PROSTITUSI

Beda jaman, beda juga argumennya. Swedia harus menyusuri jalan panjang berliku dalam memerangi prostitusi.

Perdebatan panjang tentang bisnis prostitusi sudah berlangsung sejak abad ke-18. Swedia pertama kali mengesahkan UU tentang prostitusi di tahun 1734 yang melarang keras hubungan seksual di luar ikatan resmi pernikahan. Dalih yang berkembang kala itu adalah hukum agama dan kesehatan.

Seperti negara-negara di Benua Biru lainnya, Swedia perlahan mendelegasikan kebijakan mengontrol prostitusi kepada para pemerintah daerah yang ada di wilayah teritorialnya mulai tahun 1833. Tiga tahun kemudian, bisnis tertua di dunia itu sempat dilarang sama sekali tetapi nyatanya setahun kemudian, lokalisasi yang dikelola pemerintah didirikan. Kendati demikian, lokalisasi tetap saja tidak cukup laris, sama halnya dengan lokalisasi milik swasta.

Sejak tahun 1847, prostitusi ditetapkan sebagai bisnis ilegal tetapi pemerintah masih memberikan toleransi dan mengatur dengan ketat, termasuk untuk masalah uji medis dan melarang rumah sakit merawat pasien yang tertular penyakit seksual.

Aturan lain bahkan mengontrol ketat kawasan prostitusi hingga jenis pakaian yang dikenakan para PSK. Lama kelamaan, kebijakan ini dikritisi oleh Kaum Feminis. Menurut mereka, larangan itu mengganggu dan sangat bias gender. Hingga akhir abad ke-18, Swedia akhirnya mempertemukan perbedaan pendapat antara Kaum Feminis dengan Kaum Liberal. Klausul tentang prostitusi gender pun lantas dihapuskan dari Undang-undang yang semula hanya ingin menjaga Rakyat Swedia dari penularan penyakit seksual itu.

Kontrol terhadap prostitusi akhirnya diputuskan jadi tanggung

jawab nasional di tahun 1918 berdasarkan pemberlakuan dua Undang-undang yaitu *The Lex Veneris (1918)* dan *The Vagrancy Law (1885)*. Kedua regulasi ini menekankan akan ancaman bahaya penyakit dan pengangguran terhadap rakyat yang masih menggunakan layanan prostitusi. Uang yang didapat dari bisnis ini pun dapat dinilai sebagai 'uang haram.'

Oleh komisi negara tiga tahunan (1923, 1926, 1929) prostitusi digambarkan sebagai penyakit berbahaya yang maknanya masih harus dikoreksi dengan dalih nilai-nilai moral. Atas penilaian ini, suara perempuan pun terpecah. Perdebatan yang semula sebagai penyakit berbahaya jadi terkalahkan oleh debat panjang tentang moralitas. Sementara perempuan yang terlanjur menjadi PSK, hanya diwajibkan berlaku jujur baik terhadap masyarakat maupun kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Satu kesimpulan yang akhirnya disepakati adalah siapapun pria yang tertangkap tangan sedang "jajan" akan segera diberi sanksi

moral berupa stigma sebagai pria berbahaya bagi semua perempuan.

Memasuki tahun 1950, perdebatan tentang prostitusi kembali menguap. Aneka sanksi sosial rupanya masih belum kuat membentengi rakyat. Debat panjang di Riksdag kala itu menyatakan bahwa penyebab utama prostitusi di negara itu adalah "permintaan" dari para pria hidung belang. Sewindu kemudian, prostitusi oleh anggota parlemen perempuan resmi ditetapkan sebagai persoalan penting dalam negeri Swedia sepanjang masa. Komisi tiga tahunan pun diminta lanjut bekerja hingga tahun 1962. Meskipun sama-sama menentang tetapi beda penilaian prostitusi sebagai penyakit berbahaya dan penyakit masyarakat sebenarnya terus berlangsung hingga kini. Yang terakhir adalah dengan amandemen regulasi di tahun 2005 lalu tentang larangan membeli jasa seks.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menetapkan kalau hukuman penjara bagi pengguna jasa seks hanyalah salah satu pilihan, sementara parlemen meminta ada

hukuman kurungan minimal satu tahun. Namun hingga kini tidak seorangpun yang dipenjara karena kasus prostitusi.

Hasil riset baik dari pemerintah maupun akademisi menunjukkan, efek paling jelas dari pemberlakuan hukum dan larangan tentang prostitusi terbukti berhasil menekan jumlah pria hidung belang. Bisnis seks ini makin lama makin tidak terlihat, seiring menurunnya jumlah pelanggan seks yang dihukum kerja sosial untuk melayani masyarakat. Data tahun 2008 menunjukkan, angka pengguna seks yang semula 12,7 persen dari total populasi Swedia telah turun menjadi 7,6 persen. Para responden yang terlibat dalam penelitian pun mengaku kalau mereka tidak akan menggunakan jasa seks sekalipun tengah berada di luar negeri, begitu juga dengan jasa seks secara online lewat internet.

Survey publik menunjukkan pula kalau Rakyat Swedia sangat mendukung regulasi tentang prostitusi. Lembaga survey, SIFO, di tahun 1999 mengumumkan dukungan rakyat terhadap Undang-undang itu hingga sebesar 81 persen. Hasil survey serupa oleh *Durex*, selaku produsen kondom, menegaskan kembali kalau Swedia adalah negara dengan angka pengguna jasa seks paling rendah.

Oleh sebagian masyarakat, penegakan hukum terhadap prostitusi dinilai masih belum terlalu ketat. Para pria hidung belang, meskipun jumlahnya kecil tetapi mereka tetap ada. Mengapa? Karena memang polisi juga masih terus bekerja "memburu" mereka yang telah jadi konsumen setia prostitusi dari para PSK yang justru banyak datang dari negara tetangga mereka seperti Rumania dan Finlandia itu. *(IN)*

PROSTITUTION

GENERASI UNGGUL: MULAI DARI POLA ASUH DAN LINGKUNGAN YANG BAIK

Anak-anak Indonesia seharusnya dibesarkan dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan terlindungi. Jauh dari aneka tindak kekerasan dan juga penelantaran. Demikian pesan Ibu Menko PMK.

Menko PMK, Puan Maharani, pada Hari Minggu terakhir di bulan April 2015 lalu berkesempatan menghadiri acara jalan santai di sepanjang Jl. MH Thamrin, Jakarta. Jalan santai yang diselenggarakan oleh Gerakan Peduli Anak Indonesia (Ku Gapai) ini bertujuan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bergerak menghentikan dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Sebelum melepas peserta jalan santai, Menko PMK mengungkapkan bahwa sebagai seorang perempuan yang juga sebagai ibu, anak-anak Indonesia diharapkannya dapat bertumbuh kembang dalam lingkungan yang mendukung yaitu lingkungan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk berkreasi, penuh kasih sayang, aman dan terlindungi.

“Saya juga mengajak kita semua untuk menolak segala bentuk kekerasan pada anak dan sama-sama berkomitmen termasuk pemerintah, perguruan tinggi, legislatif, media, masyarakat, organisasi sosial, dan keluarga Indonesia untuk bersinergi dalam menangani kekerasan pada anak sehingga anak-anak kita dapat menjadi generasi Indonesia yang percaya diri, kreatif, dan berkepribadian luhur.”



Namun, tidak lama berselang, publik ibukota kembali digemparkan dengan kasus kekerasan terhadap anak berupa tindak penelantaran yang terjadi di salah satu kawasan perumahan elit di Cibubur, Jakarta Timur.

Pada Kamis, 14 Mei 2014, polisi mendobrak paksa pintu salah satu rumah di Perumahan Citra Gran Cibubur. Adalah pasangan bernama Utomo Pernomo dan Nurindra Sari diduga telah menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka. Salah seorang anak mereka berinisial D (8 th) mengaku tidak diizinkan berada di rumah selama satu bulan terakhir. Sampai-sampai D tidur di pos penjagaan dan hidup dibantu warga sekitar.

Publik terlanjur dibuat geram, terlebih dengan hasil temuan polisi yang mendapatkan narkoba jenis sabu di lantai dua rumah pasangan orang tua yang dinilai tega ini. Komentar pun banyak terlontar, bahkan Mendikbud, Anies Baswedan, mengaku sangat prihatin dengan pola asuh yang diterapkan oleh pasangan Utomo dan Nurindra.

"Mendidik anak harus dilakukan secara positif, dengan cara yang benar. Memang perlu kerja keras dalam mendidik anak. Kalau ingin membentuk karakter anak harus sesuai dengan aturan, bukan dengan pola yang salah," kata Mendikbud seperti dikutip dari *Tempo*.

Sementara itu, Mensos, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bila saat ini terdapat 4,1 juta anak terlantar di Indonesia dan sekitar 5.900 di antaranya mengalami kasus penelantaran oleh orang tua mereka atau seperti yang dialami oleh kelima orang anak pasangan Utomo dan Nurindra Sari.

"Ada 4,1 juta anak terlantar, kasus seperti ini (lima orang anak di Cibubur) ada 5.900, anak bermasalah hukum ada 3.600, balita terlantar ada 1,2 juta, dan anak jalanan ada 34 ribu," papar mensos lagi.

Menurutnya, agar kasus-kasus penelantaran anak dapat dihindari. Berbagai upaya penguatan perlu dimulai sejak dini, yaitu dari pelatihan pranikah bagi calon orangtua hingga peran dan fungsi dari berbagai institusi atau lembaga terkait.

Dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2013 saja misalnya, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga Indonesia masih cenderung diwarnai oleh sejumlah problematika keluarga yang sangat tidak kondusif terhadap masa depan anak Indonesia. Beragam kasus yang melibatkan keluarga masih belum terselesaikan. Padahal, sejumlah produk hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sudah cukup banyak.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Rapuhnya suatu keluarga dapat menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak. Contohnya, anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum.

Kasus penelantaran anak menjadi masalah serius dan seperti fenomena gunung es, yang terus menunjukkan tren peningkatan. Kasus-kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, kasus yang dominan adalah kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran bayi serta anak telantar karena orang tua bekerja.

Maka, menurut KPAI, Jika anak tidak dimungkinkan untuk tinggal dalam keluarganya karena kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang mengancam keselamatan anak, negara berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan melalui pengasuhan alternatif.

Pengasuhan alternatif merupakan upaya pengasuhan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orang tua angkat, dan pengasuhan residensial oleh LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak)

Namun, kualitas pengasuhan alternatif di Indonesia diketahui masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian *Save The Children, Unicef*, dan Kementerian Sosial pada tahun 2007 terdapat 5.000-8.000 lembaga pengasuhan alternatif di Indonesia dalam bentuk Panti Asuhan Anak.

Penyelenggara panti asuhan anak ini mayoritas dimiliki oleh masyarakat yakni sebesar 99 persen dan hanya 40 panti asuhan anak yang dimiliki oleh pemerintah. Anak-anak ditempatkan di Panti asuhan didasarkan atas alasan kemiskinan yakni sebesar 90 persen dan karena alasan yatim piatu sebesar 6 persen.

Kualitas panti asuhan juga masih sangat rendah, rasio perbandingan pengasuh dengan anak yang diasuh tidak seimbang, kualitas pengasuh panti tidak sesuai standar, bahkan kasus kekerasan anak dengan dalil penegakan disiplin dan agama juga ditemui dalam sistem pengasuhan berbasis panti. Sarana prasarana yang terbatas menyebabkan anak tidak dalam situasi yang lebih baik berada di panti asuhan. (IN)

SAATNYA MENGISI LHKASN DAN LHKPN

Pemerintah mewajibkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Termasuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sosialisasi dan pengisian LHKASN dan LHKPN pun dilakukan di lingkungan Kemenko PMK pada awal Mei lalu.

Kewajiban penyampaian LHKASN sesungguhnya sudah digulirkan pemerintah sejak awal tahun ini.

Di Januari lalu melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta,

seluruh ASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya. Hanya saja, bagi Kementerian /instansi diluar Kemen PANDan RB, ketika itu diberikan waktu sampai tiga bulan.

LHKASN ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi

di lingkungan pemerintahan. Pemerintah berasumsi, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat di eselon II dan I saja, tetapi bisa juga terjadi di eselon III, IV serta V. Terkait aturan pelaporan harta kekayaan untuk ASN tersebut, pemerintah sendiri

sudah berkoordinasi dengan KPK. Karenanya, seluruh ASN, baik yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II), seperti diperintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pegawai eselon III, IV, IV, bahkan para staf juga wajib mengisi LHKASN.

Dengan Surat Edaran No. 1/2015 ini, diharapkan para pimpinan instansi pemerintah diminta menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN secara bertahap, dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Laporan tersebut dibuat lebih sederhana dan disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Laporan pun harus sudah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan, dan paling lambat 1 bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, serta 1 bulan setelah berhenti dari jabatan.

APIP pada masing-masing instansi diwajibkan menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan pelaporan LHKASN kepada pimpinan instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB. Secara rinci, APIP bertugas, memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan, berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN serta melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan. Termasuk melakukan klarifikasi kepada wajib

lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran, juga melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

Apabila ASN tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional. Adapun pejabat di lingkungan APIP wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi LHKASN ini. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini juga akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Sementara terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diwajibkan bagi penyelenggara negara, ini didasari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pemerintah, sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran tentang LHKPN, yakni tahun 2005, tahun 2006 dua kali, dan tahun 2008 yang berisi peningkatan ketaatan LHKPN untuk pengangkatan PNS dalam jabatan. Empat tahun berikutnya, diterbitkan lagi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kelima surat edaran terdahulu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan rawan KKN. Disamping itu, juga bagi para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk supaya menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Jadi, khusus LHKPN subyeknya memang ditujukan bagi pejabat negara dan pejabat strategis yang potensial atau rawan KKN. Tujuan penyampaian serta pengelolaannya pun ada di KPK. Sementara, Lampiran Bukti juga menjadi sebuah kewajiban. Dan waktu penyampaiannya ialah dua bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan.

Terkait dengan Surat Edaran No 1 Tahun 2015 itu, sosialisasi serta pengisian LHKASN dan LHKPN pun turut dilakukan jajaran Kemenko PMK awal Mei lalu. Sosialisasi dan pengisian itu dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesi terdapat beberapa biro, kesekretariatan, inspektorat hingga kedeputan. Hari pengisiannya pun dibagi beberapa jadwal per bagian. Setiap ASN di lingkungan Kemenko PMK pun sangat antusias mengikuti pengisian LHKASN. Mereka tak segan membawa laptop atau notebook pribadi untuk memudahkan pengisian. **PS/db**



SEGARNYA OLAHAN BUAH CARICA

Sirup carica tetap menjadi primadona bagi mereka yang berkunjung ke Dieng. Selain unik rasanya juga segar buat pengusir gerah.

Buah carica saat ini banyak tumbuh di dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Buah carica mirip sekali dengan papaya dengan warnanya kehijauan dan setelah matang menjadi kekuningan. Buah ini mengandung berbagai jenis zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti enzim, vitamin, dan mineral.

Meski memiliki kandungan gizi yang tinggi, sayangnya buah carica

tidak bisa dimakan langsung, karena daging buahnya banyak mengandung getah penyebab rasa pahit dan gatal pada tenggorokan bahkan bisa melukai kulit.

Buah ini cocok dimakan oleh orang yang memiliki perut lemah terhadap buah-buahan karena mempunyai sifat memperbaiki pencernaan. Orang Dieng biasanya mengkonsumsinya dengan membelahnya menjadi dua, kemudian diambil biji-bijinya untuk

dihisap. Nah biji carica yang punya cita rasa manis yang khas bisa dimanfaatkan untuk membuat stup atau sirup dengan cara yang cukup sederhana.

Melihat potensi buah carica yang begitu besar maka Eko Budi Sulistiyo mencoba merintis bisnis minuman rumahan dengan mengolah buah carica menjadi sirup. Sirup carica hasil olahannya, kemudian dipasarkan dengan menitipkannya ke toko-toko sekitar tempat tinggalnya.

Di luar dugaan ternyata hasil olahan buah carica dapat diterima oleh pasar.

Respon pasar yang baik membuat Eko semakin bersemangat dalam berbisnis. Beragam inovasi kemasan produk diciptakan agar pasarnya semakin meningkat. Ia juga mengangkat beberapa karyawan untuk membantunya dalam melakukan proses produksi. Bisnis minuman pengolahan buah carica pun semakin berkembang dengan kapasitas produksinya juga mampu mencapai 1 ton buah carica setiap harinya. Beragam produk yang dihasilkan antara lain olahan buah carica yang dikemas dalam glas jar, cup mangkok, plastic pouch dan lain sebagainya.

Hal senada juga dijalankan Saroji yang dulunya bekerja sebagai penjual tiket di kompleks candi Arjuna. Sejak candi Arjuna dipercantik sekitar awal tahun 2004, dirinya mulai melihat peluang bisnis oleh-oleh khas Dieng seiring meningkatnya kunjungan wisata di Dieng.

Usaha pertama yang digelutinya dengan meracik serbat purwaceng. Minuman yang diracik dari beragam bahan seperti potongan daun yang dikeringkan, serbuk, campuran dengan kopi dan susu, dan akar. Racikan yang telah diolah hingga tinggal diminum airnya itu banyak peminatnya.

Untuk menambah variasi usahanya, Saroji juga membuat manisan carica. Pilihan pada carica karena kebetulan istrinya memiliki keahlian meracik carica menjadi manisan. Dalam proses pembuatan manisan carica, buah dan biji direbus bersama gula dan pada tahap akhir bijinya diperas agar dapat

memberikan rasa asam yang segar. Penganan oleh-oleh buatan saroji baru dipasarkan di sekitar Dieng dan Wonosobo karena masih sedikit produksinya.

PROSES PEMBUATAN

Proses pembuatan sirup buah carica dimulai dari pengupasan, pemisahan buah dari bijinya, pemotongan, pembuatan sirup buah dan pengemasan. Pada proses



pengupasan yang perlu diingat karena sifat buah carica banyak mengandung getah maka saat pengupasan sangat dianjurkan untuk mengenakan sarung tangan supaya tidak gatal.

Usai dikupas biji buah dikeruk dan dipisahkan dengan daging buahnya. Biji buah inilah yang nantinya diperas untuk membuat sirup yang memberi cita rasa khas pada buah. Biji buah ini berwarna hitam, dan di luarnya ada selaput putih yang membungkus seluruh biji. Biji dan selaput putih inilah yang disesap-sesap untuk menikmati buah carica secara tradisional.

Usai dipisahkan dengan bijinya, buah dipotong-potong dengan bentuk yang menarik dan supaya dapat dikemas dalam botol. Bentuk yang banyak dipilih berbentuk

segitiga, dipotong mengerucut mulai pangkal buahnya.

Proses selanjutnya, buah dicuci sebanyak dua kali proses. Pencucian pertama dilakukan ketika selesai dikupas. Saat pencucian tahap kedua disertakan garam sebanyak dua sendok makan. Fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa pahit yang berasal dari getah.

Tahapan selanjutnya yakni

pembuatan sirup buah. Caranya, biji beserta selaput yang melapisinya ditambah sedikit air kemudian diperas sampai keluar cairan kental yang berbau khas buah carica. Pemerasan dapat dilakukan berkali-kali sampai aroma khas tersebut hilang. Tambah air dan gula pasir secukupnya kemudian direbus sampai mendidih. Usai mendidih, sirup yang

sudah jadi harus disaring untuk dipisahkan dengan ampasnya.

Tahapan selanjutnya, proses pengemasan. Buah yang dipotong-potong dicampur dengan sirup yang udah jadi dikemas dalam botol dan dikukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah dikukus, botol diambil dari dandang, kembali dipenuhi dengan sirup, dan ditutup rapat-rapat.

Untuk proses pengawetan dilakukan dengan cara sederhana yakni botol yang telah ditutup direbus di dalam panci bermulut lebar selama kurang lebih 10 menit. Cara pengawetan ini bisa membuat buah carica dalam sirup bertahan sampai kurang lebih 2 tahun.

(yn/dbs)

BONUS BAGI INDUSTRI HIJAU

Pemerintah Indonesia terus menawarkan dukungan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri hijau.



Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang ramah lingkungan (industri hijau) di negeri ini semakin kuat dengan memberikan beragam kemudahan dan intensif. Kebijakan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Bahkan pemerintah juga menawarkan beberapa proyek industri hijau.

Keseriusan pemerintah ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada acara Tropical Landscape Summit 2015. Beberapa jenis industri hijau yang ditawarkan, diakui MenLH&K, sejalan dengan program kementerian dalam lima tahun ke depan. Ada sembilan jenis industri hijau yang ditawarkan antara lain pengembangan hutan energi, ekowisata dan pembentukan kebun

raya atau hutan kota penangkaran satwa langka, dan pengembangan hutan non hasil kayu seperti getah dan sebagainya. Selain itu, ada juga pengembangan produk substitusi impor, pengolahan limbah energi dari hasil pemanfaatan mikroba, dan pemanfaatan panas bumi (geothermal).

Untuk menunjang kebijakan tersebut, lanjutnya, pemerintah sedang menyiapkan insentif dan

kemudahan bisnis bagi pelaku usaha yang berinvestasi di sembilan proyek industri hijau tersebut. Salah satu kemudahan yang akan ditawarkan, adalah kemudahan akses perbankan melalui kemudahan urusan dan administrasi.

Di samping itu juga ada pinjaman lunak dengan bunga rendah. Kemudahan pinjaman lunak ini diberikan bagi perusahaan yang melakukan penanaman pohon yang berusia panjang, hingga 70 tahun. Penanaman pohon ini sangat penting untuk menyerap karbon, yang dapat berdampak baik bagi lingkungan.

Lebih lanjut, MenLH&K menegaskan, pemerintah juga tidak akan lagi melakukan verifikasi untuk perusahaan yang mengajukan perpanjangan izin investasi hijau. Izin ekowisata diberikan selama 35 tahun, sementara izin yang lain hanya 20 tahun dan bisa segera diperpanjang jika masa kontrak sudah habis.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, Saleh Husin mengungkapkan ada dua strategi pemerintah dalam mewujudkan industri hijau. Dua strategi tersebut adalah mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain penerapan standar industri hijau pada industri tekstil, ubin keramik, semen, baja, serta pulp dan kertas.

Di sisi lain, untuk pembangunan industri baru, pemerintah mendorong penerapan prinsip-prinsip industri hijau dalam proses produksi seperti penggunaan bahan baku, energi, dan air yang efisien. Sedangkan pemberian insentif berlaku bagi industri yang telah menerapkan industri hijau berupa peningkatan kapasitas sumber

daya manusia perusahaan industri, dukungan promosi, serta penyediaan tenaga ahli audit energi, air dan bahan baku.

20 PERSEN PER TAHUN

Industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Industri hijau mensyaratkan bahan baku, energi, dan proses yang ramah lingkungan. Selain itu dibutuhkan teknologi yang ramah lingkungan sehingga bisa seefisien mungkin dalam penggunaan sumber daya alam. Industri hijau juga mensyaratkan adanya limbah buang yang tidak terlalu merusak lingkungan.

Dalam lima tahun terakhir investasi di industri hijau mencapai US\$ 41 miliar. Targetnya pada 2019, realisasi penanaman modal untuk industri ramah lingkungan mencapai US\$ 100 miliar.

Adanya kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah diharapkan memberikan dampak pertumbuhan industri hijau hingga 20 persen.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, investor di industri hijau akan mendapatkan keistimewaan berupa fasilitas insentif bagi sektor industri hijau. Hal tersebut guna mendukung kompetisi antara industri hijau dengan industri konvensional lainnya. Diakuiinya, Setidaknya ada tiga tantangan dalam pengembangan industri hijau. Pertama, industri hijau perlu dukungan teknologi tinggi yang biayanya mahal. Kedua, industri hijau membutuhkan sumber daya manusia yang andal. Ketiga, insentif untuk industri hijau harus ditingkatkan. Selama ini pengembangan industri hijau masih cenderung mahal. Sehingga, insentif diperlukan untuk bersaing dengan produk konvensional di pasaran.

Untuk itu, lanjut Franky, pemerintah sudah menyediakan fasilitas baik fiskal maupun non fiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* untuk 5 sampai 10 tahun, kepada industri biofuel dan sumber daya alam terbarukan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015, pemberian *tax allowance* diberikan kepada 143 sektor bisnis. Dari jumlah tersebut sekitar 10 sektor industri hijau termasuk di dalamnya, diantaranya panas bumi dan energi terbarukan.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah juga akan memberikan keringanan cukai untuk mengimpor bahan baku dan mesin yang dibutuhkan selama dua tahun produksi. Insentif non fiskal juga akan diberikan bagi industri hijau, antara lain kemudahan perizinan, dengan program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Bagi para pekerja asing, juga akan mendapat kemudahan dalam hal perizinan. Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi investor yang akan menanamkan modalnya di kawasan industri dan memberikan zona ekonomi khusus.

Pemerintah pun telah membangun sebelas kawasan ekonomi khusus baru untuk menarik investasi. (yn/dbs)



MAY DAY SEMAKIN MENDUNIA

- 1 Mei--Diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia. Indonesia mulai merayakannya pada tahun 1920. Ibarruri Aidit (putri sulung D.N. Aidit) sewaktu kecil bersama ibunya pernah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Uni Soviet, sesudah dewasa menghadiri pula peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 1970 di Lapangan Tian An Men, RRC. Pada peringatan itu, menurut Dia hadir juga Mao Zedong, Pangeran Sihanouk dengan istrinya Ratu Monique, Perdana Menteri Kamboja Pennut, Lin Biao (orang kedua Partai Komunis Tiongkok) dan pemimpin Partai Komunis Birma Thaksin B Tan Tein. Namun, sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, dan sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia. Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Hari Buruh lalu ditetapkan sebagai hari libur nasional di tahun 2013 dan baru mulai dilaksanakan di tahun 2014.
- 2 Mei--Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda, Dia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda, dan ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia. Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai menteri pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Filosofinya, tut wuri handayani ("di belakang memberi dorongan"), digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dia wafat pada tanggal 26 April 1959.
- 17 Mei—Diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Bersamaan dengan peresmian Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980, di Jakarta, dicanangkan pula sebagai



Hari Buku Nasional. Ide awal pencetusan Hari Buku Nasional ini datang dari golongan masyarakat pecinta buku, yang bertujuan memacu minat atau kegemaran membaca di Indonesia, sekaligus menaikkan angka penjualan buku. Terbukti kemudian, sedikit banyaknya peringatan Hari Buku mampu memberikan dampak positif dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku.

- 20 Mei—Diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Kebangkitan Nasional ditandai dengan 2 peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli. Pada tahun 1912 partai politik

INI FAKTANYA!

- Kata 'Wiki' pada wikipedia adalah singkatan dari 'What I Know Is.'
- Menurut penelitian mengatakan bahwa melihat foto kekasih dapat mengurangi rasa sakit, baik fisik maupun mental. [Stanford University]
- Perbedaan antara cumi-cumi dan gurita adalah cumi memiliki 10 lengan sedangkan gurita memiliki 8 lengan.
- Air cucian beras sangat efektif utk membersihkan leher & memutihkan. Gunakan air tsb utk memijat leher slama 10menit sbml mandi. [kompas]
- Toilet yg diberi pencahayaan biru menyusahkan bagi pengguna narkoba krn mereka tdk bisa melihat pembuluh darahnya.
- Ada nama sekolah SD SETAN di desa Setan Candiretno, Secang, Magelang, Jawa Tengah.
- Mengenakan celana jins tanpa mencucinya selama 15 bulan masih dianggap aman bagi kesehatan.
- Tradisi Eropa kuno, meminta maaf dengan memberikan apel, oleh karenanya bahasa Inggris permintaan maaf adalah 'apology'.
- Koran pertama yang diterbitkan di dunia adalah Acta Diurna pada tahun 59 SM di Roma, dipahat pada lembaran batu.
- Indonesia memiliki primata terkecil di dunia, Tarsier Pygmy (Tarsius Pumilus), hanya ada di Sulawesi.
- Malahayati dari Aceh adalah Laksamana wanita pertama di dunia.
- Indonesia berada pada urutan 39 dengan cadangan devisa di bank terbesar dalam bentuk emas, yaitu 73,1 ton.
- Rutin berkunjung ke ibu kandung dan ibu mertua meningkatkan skor kebahagiaan hingga 78,7, jauh di atas skala normal 73,6 sampai 76,7.

pertama Indische Partij berdiri. Ditahun 1912 itu juga berdiri Sarekat Dagang Islam (Solo) yang didirikan oleh Haji Samanhudi, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta serta Dwijo Sewoyo dan kawan-kawan mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera di Magelang Jawa Timur. Suwardi Suryoningrat yang tergabung dalam Komite Boemi Poetera, menulis Als ik eens Nederlander was (Seandainya aku orang Belanda), pada tanggal 20 Juli 1913 yang memprotes keras rencana pemerintah Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaannya di Hindia Belanda. Karena tulisan inilah dr. Tjipto Mangunkusumo serta Suwardi Suryoningrat dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka, tetapi "karena boleh memilih", keduanya dibuang ke Negeri Belanda. Namun Di sana Suwardi justru belajar ilmu pendidikan dan dr. Tjipto karena sakit dipulangkan ke Indonesia.

- Pada tahun 1906, Karl Frederich May menulis 'Pacific Shore' bercerita tentang kebun-kebun bunga di Padang.
- Menyilangkan lengan dapat mengurangi rasa sakit fisik apapun. [Penelitian di University College, London]

"Bahan utama yang paling penting dalam resep untuk sukses adalah mengetahui bagaimana bergaul dengan orang-orang"
- Theodore Roosevelt

"Tak diinginkan, tak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan orang, itu merupakan derita kelaparan yang hebat, kemiskinan yang lebih besar daripada orang yang tak bisa makan. Kita harus saling merasakan hal itu."
- Bunda Theresa

"Kalau manusia berangsur menjadi tua, umumnya Dia cenderung menentang perubahan, terutama perubahan ke arah perbaikan."
- John Steinbeck



Menko PMK Puan Maharani bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, beserta para kepala negara dan petinggi negara Asia Afrika melakukan perjalanan napak tilas dari Hotel Savoy Homann menuju Gedung Merdeka, Bandung dalam rangka Konferensi Asia Afrika 2015.



Mendampingi Presiden Joko Widodo Menko PMK Puan Maharani membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk buruh penyadap karet PT Perkebunan Nusantara 3 (PTPN 3) di area perkebunan karet Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.



Menko PMK Puan maharani, membubuhkan tanda tangan dalam ajang jalan sehat "Walk for Children Hentikan Kekerasan Pada Anak" yang dilaksanakan di Jl. MH. Thamrin, Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani menghadiri acara Workshop “Fostering Commitment and Leadership for Philanthropy’s Engagement in the Post-2015 Development Agenda for Indonesia” (Menumbuhkan Komitmen dan Kepemimpinan untuk Kerja sama Filantropi dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Indonesia), yang dilakukan atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani, menandatangani sampul prangko peringatan HUT ke-40 TMII di Theater Bhineka Tunggul Ika, Jakarta.



Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang juga Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko PMK, Chazali Situmorang memberikan keterangan pers tentang High Level Knowledge Exchahange yang diselenggarakan oleh DJSN dan Bappenas di Jakarta.



Deputi Perdana Menteri Korea Selatan, Hwang Woo-Yea disambut Menko PMK Puan Maharani dalam kunjungannya ke Kantor Kemenko PMK, Jakarta.



**“Bangkitkan
Semangat Kerja
Keras Mewujudkan
Indonesia Maju
dan Sejahtera”
Indonesia Bisa**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**